

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN PELABUHAN PENGUMPAN
LOKAL DINAS PERHUBUNGAN OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN ROKAN HILIR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

Selvia Dewi K

NPM : 157110245

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

PEKANBARU

2020

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, penulis merasa sangat bersyukur atas petunjuk dan penerangan yang telah diberikan Allah SWT, sehingga penulis dapat merampung penyelesaian Skripsi ini yang berjudul **“Implementasi Rencana Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal di Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir”**. Shalawat dan salam penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suritauladan dan pengajaran, sehingga terbukalah berbagai hikmah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia hingga akhir zaman.

Pada kesempatan yang baik ini, penulis menyampaikan terima kasih yang setulus – tulusnya baik secara langsung maupun tidak langsung atas segala dukungan, bantuan, bimbingan, pengarahan, nasehat, dan pemikiran dari berbagai pihak selama proses studi dan juga selama proses penyusunan Skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH, MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Ibu Lilis Suriani, S.Sos, M.Si selaku ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Bapak Hendry Andry, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran selalu mengingatkan penulis, memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang mana telah mendidik dan memberikan dorongan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
6. Seluruh staf, karyawan/ti Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau dan serta Perpustakaan Fakultas Ilmu

Sosial Dan Ilmu Politik dan Perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan administrasi membantu penulis menyelesaikan administrasi mengenai surat menyurat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan penyelesaian Skripsi ini.

7. Kepada Ayahanda dan Ibunda Terimakasih telah memberikan dukungan materil maupun moril. Serta terimakasih kepada adik – adik yang telah memberikan motivasi penulis untuk dapat menyelesaikan Skripsi.
8. Kepada Muhammad Arsy Ash Shiddiqy, S.IP., M.A. terimakasih sudah selalu mengingatkan, dan dengan sabar memberikan motivasi serta membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Terimakasih untuk diri saya sendiri sudah mampu tangguh dan kuat, sabar, ikhlas, tegar dan tetap senyum dalam melewati segala hal sehingga dapat diterbitkan.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Skripsi ini.

Wabillahitaufikwalhidayah, wassalamualaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 24 Agustus 2020

Penulis

Selvia Dewi K.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
PERSETUJUAN HASIL REVISI UJIAN KONFEREHENSIF.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	17
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	19
A. Studi Kepustakaan.....	19
1. Konsep Administrasi.....	19
2. Konsep Organisasi.....	22
3. Konsep Manajemen.....	24
4. Konsep Kebijakan.....	25
5. Konsep Implementasi Kebijakan.....	28
6. Konsep Koordinasi.....	32
7. Konsep Pelabuhan.....	38
8. Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir.....	41
B. Kerangka Pemikiran.....	49
C. Hipotesis.....	49
D. Konsep Operasional.....	50
E. Operasionalisasi Variabel.....	52
F. Teknik Pengukuran.....	54
BAB III METODE PENELITIAN.....	59
A. Tipe Penelitian.....	59
B. Lokasi Penelitian.....	59
C. Populasi dan Sampel.....	60
D. Teknik Penarikan Sampel.....	61
E. Jenis dan Sumber Data.....	61
F. Teknik Pengumpulan Data.....	62
G. Teknik Analisa Data.....	64
H. Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian.....	64

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	66
A. Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hilir.....	66
B. Dinas Permukiman Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir	76
C. Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir	80
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	85
A. Gambaran Subjek Penelitian	85
B. Hasil Penelitian Implementasi Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal Dinas Perhubungan Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir.....	87
C. Faktor Penghambat Implementasi Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal Dinas Perhubungan Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir.....	108
BAB VI PENUTUP	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran.....	112
DAFTAR KEPUSTAKAAN	116

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 Jumlah Pelabuhan di Kabupaten Rokan Hilir	8
II.1 Tabel Operasionalisasi Variabel Implementasi Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal Dinas Perhubungan Oleg Dinas PUPR Kabupaten Rokan Hilir.....	53
III.1 Tabel Informan Penelitian.....	61
III.2 Tabel Jadwal Kegiatan Penelitian tentang Implementasi Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal Dinas Perhubungan Oleg Dinas PUPR Kabupaten Rokan Hilir... ..	64
IV.1 Nama – nama Sungai dalam Kabupaten Rokan Hilir menurut Kecamatan	72
V.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	85
V.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	85
V.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	86
V.4 Tanggapan responden Dinas Perhubungan dalam indikator Komunikasi Pada Implementasi Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal Dinas Perhubungan Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir	89
V.5 Tanggapan responden Dinas PUPR dalam indikator Komunikasi Pada Implementasi Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal Dinas Perhubungan Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir	90
V.6 Tanggapan responden Dinas Perhubungan dalam indikator Sumber Daya Pada Implementasi Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal Dinas Perhubungan Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir	93
V.7 Tanggapan responden Dinas PUPR dalam indikator Sumber Daya Pada Implementasi Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal Dinas	

	Perhubungan Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir	95
V.8	Tanggapan responden Dinas Perhubungan dalam indikator Disposisi Pada Implementasi Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal Dinas Perhubungan Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir	97
V.9	Tanggapan responden Dinas PUPR dalam indikator Disposisi Pada Implementasi Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal Dinas Perhubungan Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir	99
V.10	Tanggapan responden Dinas Perhubungan dalam indikator Struktur Birokrasi Pada Implementasi Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal Dinas Perhubungan Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir	101
V.11	Tanggapan responden Dinas PUPR dalam indikator Struktur Birokrasi Pada Implementasi Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal Dinas Perhubungan Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir	103
V.12	Rekapitulasi Tanggapan responden Dinas Perhubungan dalam Implementasi Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal Dinas Perhubungan Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir	104
V.13	Rekapitulasi Tanggapan responden Dinas PUPR dalam Implementasi Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal Dinas Perhubungan Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir	105

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
I.1	Struktur Organisasi Dinas PUPR Kabupaten Rokan Hulu...	12
I.2	Alur Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal Kabupaten Rokan Hilir.....	14
II.1	Kerangka Pikiran Tentang Proses Rancang Bangun Fasilitas Pelabuhan Pelayaran Lokal Oleh Dinasi Perhubungan di Kabupaten Rokan Hilir.....	49



IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL DINAS PERHUBUNGAN OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN ROKAN HILIR

ABSTRAK

Oleh

Selvia Dewi K

Pelabuhan dalam aktivitasnya mempunyai peran penting dan strategis untuk mendorong/ mobilisasi sosial dan ukuran pertumbuhan industri dan perdagangan serta merupakan segmen usaha yang dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional maupun daerah. Pembangunan kawasan pelabuhan harus efisien. Suatu pelabuhan yang efisien merupakan prasyarat bagi perkembangan ekonomi dari suatu kawasan. Di dalam pelaksanaan pembangunan pelabuhan, Dinas Perhubungan melakukan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam bidang pengelolaan teknis kegiatan pembangunan. Namun pada kenyataannya pembangunan fisik yang sudah direncanakan dalam perencanaan pembangunan pelabuhan pengumpan lokal di Kabupaten Rokan Hilir tidak terlaksana dengan baik, di lihat dari tidak terlaksananya pembangunan pelabuhan sinaboi dimana tipe pelabuhan tambatan perahu 2019 dan pelabuhan sungai pinang dengan tipe pelabuhan tambata perahu 2019. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk Mengetahui dan menganalisis Implementasi Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal Dinas Perhubungan Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Rokan Hilir. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu survey deskriptif dengan metode kuantitatif. Jumlah populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian berjumlah 18 orang dengan menggunakan teknik sensus yang terdiri dari Dinas Perhubungan dan Dinas PUPR Kabupaten Rokan Hilir. Teknik pengumpulan data dengan kuisisioner serta analisis data secara deskriptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa bahwa Implementasi Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal Dinas Perhubungan Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir sampai saat ini pembangunan pelabuhan belum terimplementasi, berdasarkan indikator komunikasi dan sumber daya. Hal ini dibuktikan belum adanya pelabuhan yang dibangun sampai saat ini di Kabupaten Rokan Hilir.

Kata Kunci : Implementasi, Pembangunan, Pelabuhan.

**IMPLEMENTATION OF DEVELOPMENT OF LOCAL PORCH PORT
DEVELOPMENT IN RELATIONSHIP BY GENERAL EMPLOYMENT
SERVICES AND ARRANGEMENT OF SPACE OF ROKAN HILIR
DISTRICT**

ABSTRACT

By

Selvia Dewi K

Ports in their activities have an important and strategic role to encourage / social mobilize and measure the growth of industry and trade as well as a business segment that can contribute to national and regional development. The development of the port area must be efficient. An efficient port is a prerequisite for the economic development of a region. In carrying out port development, the Transportation Agency coordinates with the Public Works and Spatial Planning Office in the field of technical management of development activities. However, in reality the physical development that had been planned in the planning for the construction of the local feeder port in Rokan Hilir Regency was not carried out properly, as seen from the incomplete construction of the Sinaboi port where the boat mooring port type 2019 and the Pinang river port with the 2019 boat port type. This research is to know and analyze the implementation of the local feeder port development at the Transportation Agency by the Public Works and Spatial Planning Agency in Rokan Hilir Regency. The type of research used in this research is descriptive survey with quantitative methods. The number of population and samples used in the study amounted to 18 people using the census technique consisting of the Transportation Agency and the PUPR Office of Rokan Hilir Regency. Data collection techniques using questionnaires and descriptive data analysis. This study concludes that the implementation of the Local Feeder Port Development of the Transportation Agency by the Public Works and Spatial Planning Office of Rokan Hilir Regency has not yet been implemented, based on communication and resource indicators. This is evidenced by the absence of a port to date in Rokan Hilir Regency.

Keywords: Implementation, Development, Port.

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Konferehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Selvia Dewi K.
NPM : 157110245
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Implementasi Pembangunan Pelabuhan Pengumpulan Lokal Dinas Perhubungan Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konfeherensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai mengacu pada kaidah – kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa ternyata melanggar atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari manapun juga.

Pekanbaru, 24 Agustus 2020

u Pernyataan,

Selvia Dewi Karin

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu administrasi pada dasarnya membicarakan fenomena kerja sama manusia untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan. Kita pahami bahwa banyak hal yang diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin didapat atau diperoleh tanpa bantuan dan kerjasama dengan orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan sandang pangan dan papan atau menggapai cita – cita misalnya, tentu individu memerlukan bantuan dan kerjasama dengan pihak lain.

Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/ beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.

Sedangkan manajemen adalah proses pencapaian tujuan melalui orang lain. Oleh sebab itu, manajemen merupakan rangkaian aktivitas menggerakkan kelompok orang dalam organisasi untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan fungsi – fungsi manajemen.

Indonesia adalah negara kepulauan, dengan jumlah pulau lebih dari 17.000. Dari sejumlah pulau tersebut, ada beberapa pulau besar, yaitu Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Pulau-pulau tersebut memiliki letak yang sangat strategis dan penting artinya bagi masyarakat. Industri transportasi laut serta perkapalan merupakan industri yang harus diprioritaskan. Hal ini mengakibatkan kebutuhan disektor pelayaran dan industri perkapalan

menjadi titik tolak kekuatan dan kemakmuran bangsa. Oleh sebab itu, perlu diusahakan transportasi laut yang dapat masuk ke wilayah pedalaman, terpencil dan daerah perbatasan.

Dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat peran transportasi laut sangat penting di Indonesia, tidak hanya sebagai alat penghubung dari satu wilayah ke wilayah yang lain di Indonesia, namun pada dasarnya transportasi laut merupakan salah satu urat nadi perekonomian yang mempunyai peranan sangat strategis sebagai penghubung antar wilayah untuk mendorong dan menggerakkan kegiatan pembangunan secara keseluruhan dalam rangka mendorong perekonomian daerah dan nasional. Hal ini dapat terealisasi karena kondisi Indonesia yaitu sebagai Negara maritim.

Untuk menunjang pelayanan transportasi angkutan laut ini diperlukan prasarana penunjang dalam hal ini pelabuhan. Fungsi pelabuhan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan yaitu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan pengusaha. Sedangkan peran pelabuhan yaitu sebagai berikut :

1. Simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya
2. Pintu gerbang kegiatan perekonomian
3. Tempat kegiatan alih modal transportasi
4. Penunjang kegiatan industry dan/atau perdagangan
5. Tempat distribusi, produksi dan konsolidasi muatan atau barang
6. Mewujudkan wawasan nusantara dan kedaulatan Negara.

Pelabuhan merupakan daerah titik simpul antara wilayah darat dengan laut, yang keberadaannya sangat dibutuhkan agar arus transportasi laut dapat berjalan lancar dan aman. Atas dasar tersebut pemerintah senantiasa meningkatkan prasarana perhubungan laut guna menunjang optimalisasi pelayanan pengangkutan

penumpang, barang maupun kendaraan baik menyangkut penambahan armada angkutan penyeberangan maupun pengadaan pelabuhan.

Pelabuhan dalam aktivitasnya mempunyai peran penting dan strategis untuk mendorong/ mobilisasi sosial dan ukuran pertumbuhan industri dan perdagangan serta merupakan segmen usaha yang dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional maupun daerah. Hal ini membawa konsekuensi terhadap pengelolaan segmen usaha pelabuhan tersebut agar pengoperasiannya dapat dilakukan secara efektif, efisien dan professional sehingga pelayanan pelabuhan menjadi lancar, aman, dan cepat dengan biaya yang terjangkau.

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari dataran dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta berbagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi (UU No.21 Tahun 1992 pasal 1, tentang pelayaran).

Pembangunan kawasan pelabuhan harus efisien. Suatu pelabuhan yang efisien merupakan prasyarat bagi perkembangan ekonomi dari suatu kawasan. Karena dengan adanya pelabuhan yang efisien berarti komponen biaya transportasi pengiriman barang dari dan ke kawasan dapat ditekan, yang pada gilirannya akan menyebabkan hasil produksi kawasan menjadi kompetitif di pasar internasional.

Tersedianya sarana dan prasarana publik yang sesuai dengan pola dan struktur pemanfaatan ruang wilayah, mutlak diperlukan bagi berjalannya fungsi-fungsi kawasan wilayah. Prasarana publik terdiri dari fasilitas-fasilitas umum seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan, sistem saluran air limbah, saluran air bersih, dan sebagainya. Prasarana umum mempunyai dampak besar terhadap taraf atau mutu kehidupan masyarakat, pola pertumbuhan, dan prospek pertumbuhan ekonominya.

Pertumbuhan ekonomi wilayah akan diikuti dengan penyerapan tenaga kerja, memicu sektor perdagangan dan pengembangan pariwisata. Terciptanya pertalian (*linkage*) antar sektor-sektor tersebut diharapkan pada jangka panjang memperkuat struktur ekonomi wilayah yang seimbang dan mampu mendukung berkembangnya perdagangan bebas.

Berdasarkan kenyataan tersebut maka pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat mutlak diperlukan. Dengan adanya pembangunan masalah tersebut diatas dapat dipecahkan atau menjadi lebih ringan. Sebaliknya, tanpa adanya pembangunan dapat dipastikan tingkat kesejahteraan masyarakat akan semakin merosot.

Tidak terkecuali dengan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang terus berupaya untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul di masyarakat. Salah satu upaya tersebut adalah dengan dilaksanakannya pembangunan pelabuhan sebagai sarana dan prasarana penunjang perekonomian yang pada akhirnya dapat memajukan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Kabupaten Rokan Hilir, terutama kota Bagan Siapiapi, perekonomian utama masyarakat berasal dari sektor perikanan. Selain ikan segar, produk yang dihasilkan dari sektor perikanan diantaranya adalah ikan asin, ebi (udang kering), terasi, ikan salai dan olahan ikan lainnya. Namun, disamping itu juga terdapat usaha kapal (pembuatan kapal), usaha galangan kapan di bagansiapiapi sudah berusia ratusan tahun, usaha ini berada di jalan Nelayan dan di Jalan Pelabuhan Baru yang berada dekat dengan pelabuhan, bahan baku utama yang digunakan adalah Kayu, kapal yang dibuat berukuran besar dan kecil.

Sedangkan kondisi Rokan Hilir saat ini sebagai DA kelautan dan pulau – pulau ketergantungan masyarakat sangat tinggi terhadap sarana dan prasarana transportasi laut di karenakan ekonomi masyarakat di Rokan Hilir khususnya bagansiapiapi berada pada sektor perikanan.

Pada pelabuhan Pelindo Bagansiapiapi di bangun sudah sejak lama, dan terus dilakukan renovasi pada tiap tahun, tipe pelabuhan ini adalah pelabuhan pengumpan lokal yang digunakan oleh masyarakat untuk angkutan barang dan jasa, pembuatan kapal/ galangan kapal, tempat dermaga bagi pelaut/ nelayan untuk mencari hasil laut. Pelabuhan ini terletak di jalan utama ujung. Pembangunan dan renovasi beberapa tahun belakangan menggunakan APBD Rokan Hilir.

Namun pada tahun 2002 pelabuhan tersebut tidak dapat difungsikan lagi, hal ini terjadi karena dua faktor, yang pertama karena pengaruh perubahan alam dan yang kedua karena pemerintah kurang tanggap dalam memelihara pelabuhan tersebut. Faktor alam yang terjadi karena alur aliran air menyempit dan tingkat sedimentasi yang tinggi, dan beberapa fasilitas pelabuhan yang sudah tidak layak

lagi digunakan, seperti jembatan pelabuhan yang rusak total dan sebagainya. Untuk pengoperasiannya pelabuhan ini membutuhkan biaya yang cukup besar, termasuk dalam biaya pengerukkan tanah yang cukup mahal, kendala – kendala yang terjadi ini menyebabkan pelabuhan tersebut menjadi pelabuhan mati.

Setelah pelabuhan lama tidak beroperasi lagi, maka pemerintah Kabupaten Rokan Hilir membangun pelabuhan baru yaitu tipe pelabuhan regional III dengan tipe pelabuhan pengumpan, dan dikelola oleh pemerintah daerah. Dana pembangunan pelabuhan ini berasal dari APBN dan kewenangan dari pelabuhan tersebut sudah di limpahkan kepada pemerintah daerah.

Tujuan pembangunan pelabuhan regional III adalah :

1. Angkutan barang dan jasa
2. Nelayan yang pencahariannya dilaut, seperti mencari ikan, kerang, galangan kapal dan sebagainya.
3. Jasa penyebrangan antar pulau, yaitu pulang halang, pulau panpahan, dan tanjung balai.
4. Mata pencaharian masyarakat.

Namun pada tahun 2016 pelabuhan Regional III Bagansiapiapi ini tidak dapat digunakan lagi, di karenakan trestlanya hancur dan dermaganya rusak parah sehingga tidak dapat digunakan lagi. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengawasan dan pemeliharaan fasilitas pelabuhan oleh pemerintah sendiri. Hingga sampai saat ini belum ada upaya pemerintah untuk memperbaharui pelabuhan tersebut dikarenakan terkendala oleh anggaran.

Setelah kedua pelabuhan tersebut tidak berfungsi dengan baik dan menghambat mata pencaharian masyarakat di Bagansiapiapi, ada pihak swasta

yang membangun tambatan perahu di bibir sungai yang ukurannya cukup besar, dengan dana pribadi tambatan perahu ini dimiliki oleh seorang masyarakat cina di Bagansiapiapi bernama Aliong, oleh sebab itu masyarakat setempat menyebutnya dengan pelabuhan Aliong. Tambatan perahu tersebut sampai hari ini masih berfungsi dengan baik. Tambatan perahu ini dibangun oleh Aliong untuk menunjang usahanya “Galangan Kapal” atau usaha perdagangan kapal yang dimiliki Aliong. Sehingga tambatan perahu tersebut digunakan oleh Aliong untuk jalur penyebrangan kapal – kapal yang sudah selesai dan akan dikirim ke Jawa.

Namun pada kenyataannya tambatan perahu ini juga digunakan oleh masyarakat setempat untuk jasa penyebrangan, angkutan barang dan dermaga bagi nelayan untuk mencari ikan dan kerang. Mengenai biaya sewa yang dibayar oleh masyarakat untuk menggunakan tambatan perahu tersebut dikelola langsung oleh pihak swasta tanpa ikut campur pemerintah.

Pemerintah hanya memberikan izin besaran biaya sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Masalah pajak badan usaha di bayarkan langsung ke Kantor Pajak, dan izin usaha dibayarkan ke dinas perindustrian dan perdagangan dan masuk kedalam kas daerah. Sampai saat ini masyarakat setempat masih menggunakan pengumpan perahu tersebut untuk berpergian dan kegiatan lainnya.

Pelabuhan merupakan salah satu prasarana dan transportasi laut yang mempunyai peranan yang sangat penting, terutama dalam kepentingan dan perkembangan daerah, pelabuhan memiliki peranan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Pelabuhan yang terdiri dari daratan dan perairan sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan ekonomi yang di gunakan sebagai tempat kapal

bersandar, berlabuh, naik turun penumpang, dan tempat bongkar muatan barang. Untuk mempelancar semua kegiatan arus barang maupun jasa pemerintah perlu menjunjung kegiatan pelabuhan agar sarana dan prasarana berjalan dengan baik. Adapun mengenai jumlah pelabuhan di Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel I.1 Jumlah Pelabuhan di Kabupaten Rokan Hilir

No	Nama Pelabuhan	Tipe Pelabuhan	Dibangun	Tidak dapat digunakan
1	Pelabuhan Pelindo	Pelabuhan Pengumpan Lokal		2002
2	Pelabuhan Regional III	Pelabuhan pengumpan	2008	2016
3	Pelabuhan Aliong	Tambatan Perahu	2017	Sekarang
4	Pelabuhan Sinaboi	Tambatan Perahu	2019	Tidak terlaksana
5	Pelabuhan Sungai Pinang	Tambatan Perahu	2019	Tidak terlaksana

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir, 2019

Dari tabel diatas diketahui jumlah pelabuhan di Kabupaten Rokan Hilir, terdapat 5 pelabuhan di Kabupaten Rokan Hilir namun 2 diantaranya sudah tidak berfungsi lagi sedangkan pelabuhan yang baru akan di bangun tidak jadi terlaksana, sehingga masyarakat masih menggunakan pelabuhan swasta milik masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir.

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah, di bidang Perhubungan. Dinas Perhubungan di pimpin oleh Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris. Pada Dinas Perhubungan dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk

melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja.

Didalam pelaksanaan sarana dan prasarana pelabuhan, Dinas Perhubungan berwenang untuk melaksanakan Pembangunan Pelabuhan dengan wewenang yang sudah di atur dan di tetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir pada Bab II Pasal 2 dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan dinas Perhubungan adalah Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan. Sementara mengenai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir dijelaskan dalam Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir.

Di dalam pelaksanaan pembangunan pelabuhan, Dinas Perhubungan melakukan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam bidang pengelolaan teknis kegiatan pembangunan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang bekerjasama dalam teknis kegiatan pembangunan, sehingga Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang mempunyai tugas, dalam hal membantu pengelolaan teknis kegiatan seperti menunjuk tenaga teknis Dinas PUPR untuk membantu dalam pengawasan dan evaluasi. Sedangkan untuk pembangunan fisik dilakukan oleh pihak ketiga yaitu kontraktor / pemborong.

Namun pada kenyataannya pembangunan fisik yang sudah direncanakan dalam perencanaan pembangunan pelabuhan pengumpan lokal di Kabupaten Rokan Hilir tidak terlaksana dengan baik, di lihat dari tidak terlaksananya

pembangunan pelabuhan sinaboi dimana tipe pelabuhan tambatan perahu 2019 dan pelabuhan sungai pinang dengan tipe pelabuhan tambata perahu 2019. Hal ini menyebabkan sulitnya akses masyarakat dalam penggunaan jasa penyebrangan yang seharusnya masyarakat gunakan untuk menyebrangi antar pulau, maupun transportasi barang, sehingga dapat dipertanyakan apa faktor dari tidak terlaksananya pembangunan pelabuhan di dinas perhubungan yang dibantu oleh dinas PUPR.

Berdasarkan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir adalah unsur Pelaksanaan Pemerintah Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana di Bidang ke PU an yang dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas.

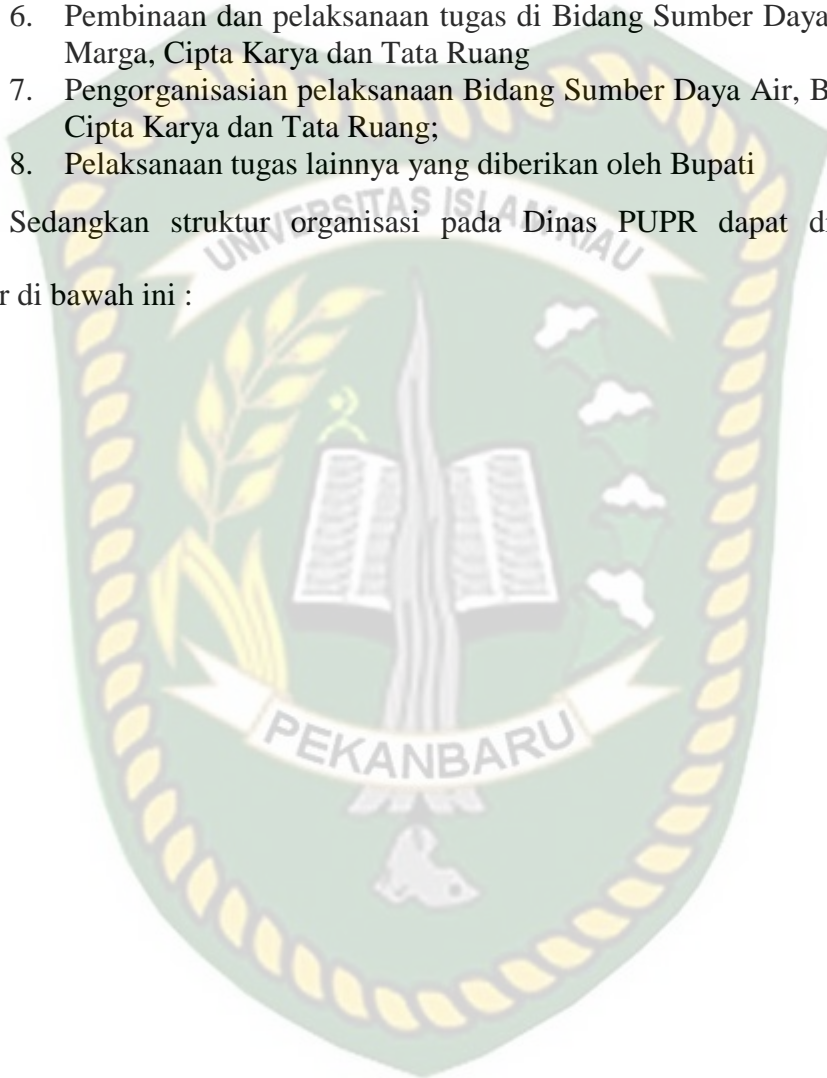
Tugas Pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 50 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir adalah : “ Menyelenggarakan Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Dibidang Ke PU an ”.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir melaksanakan fungsi :

1. Penyusunan rancangan dokumen – dokumen perencanaan RPJPD , RPJMD DAN RKPD
2. Perumusan Kebijakan teknis di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir

3. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir
4. Pelaksanaan tugas bidang Pekerjaan Umum
5. Penyelenggaraan pelaksanaan penanganan darurat akibat bencana alam
6. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Sumber Daya Air , Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
7. Pengorganisasian pelaksanaan Bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang;
8. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati

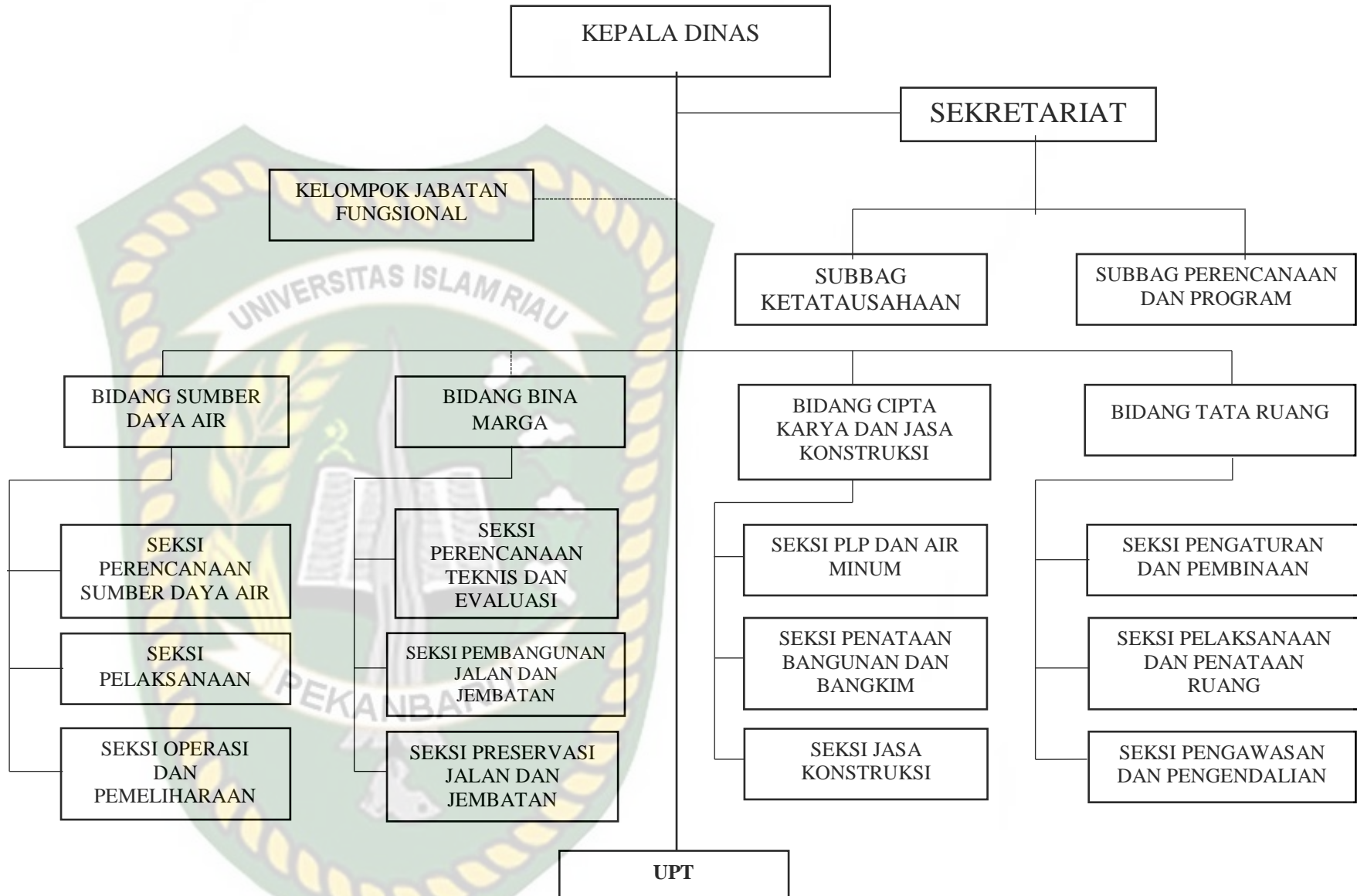
Sedangkan struktur organisasi pada Dinas PUPR dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Gambar I.1 Struktur Organisasi Dinas PUPR Kabupaten Rokan Hilir

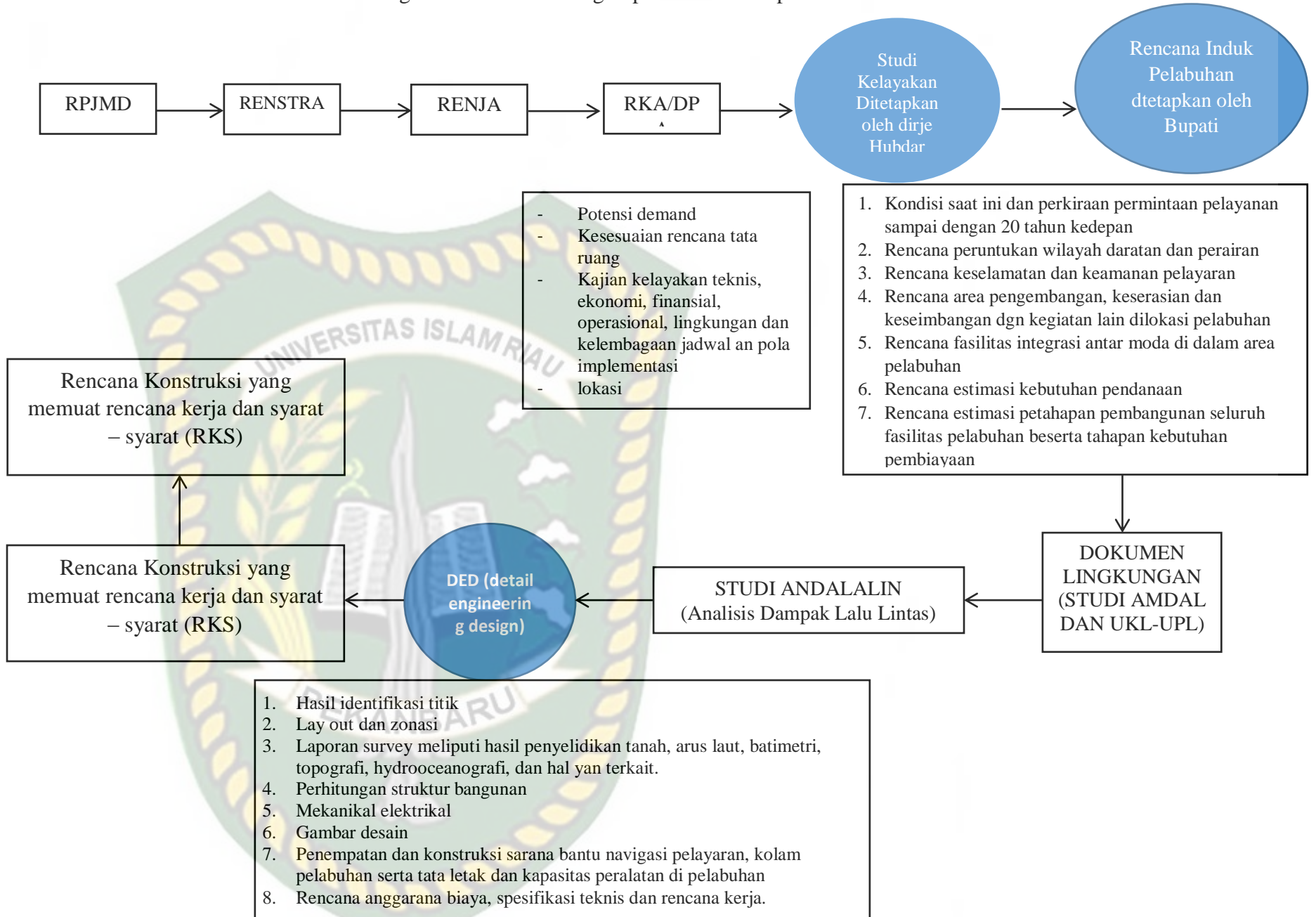


Sedangkan pengelolaan pembangunan pelabuhan laut lokal dan proses rancang bangun di tuangkan pada Peraturan Daerah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir bagian keempat bidang perhubungan laut dan udara paragraf ke dua seksi sarana dan prasarana pada pasal 17 ayat (f) yaitu

“Menyiapkan penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut lokal dan khusus lokal” dan pasal 17 ayat (m) melakukan proses rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan pelayaran lokal (kabupaten).

Adapun alur proses rancang bangun fasilitas pelabuhan pelayaran lokal oleh Dinas Perhubungan Di Kabupaten Rokan Hilir dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini :

Gambar I.1 : Alur Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal Kabupaten Rokan Hilir



Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh peran transportasi sebagai urat nadi kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Sistem jaringan transportasi dapat dilihat dari segi efektivitas, dalam arti selamat, aksesibilitas tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi, teratur, lancar dan cepat, mudah dicapai, tepat waktu, nyaman, tarif terjangkau, tertib, aman, rendah polusi serta dari segi efisiensi dalam arti beban publik rendah dan utilitas tinggi dalam satu kesatuan jaringan sistem transportasi. Fungsi Pelabuhan secara umum adalah sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai atau danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Kabupaten Rokan Hilir memiliki beberapa pelabuhan besar yaitu Pelabuhan Bagansiapiapi, Pelabuhan Panipahan, Pelabuhan Sinaboi. Berdasarkan observasi awal dapat diidentifikasi beberapa permasalahan terkait pelabuhan tersebut antara lain :

1. Belum optimalnya kinerja Dinas Perhubungan dalam rencana pembangunan pelabuhan lokal, hal ini dibuktikan dengan belum selesainya pelabuhan yang dibangun dari tahun 2017 sampai sekarang sehingga masyarakat masih menggunakan pelabuhan swasta dengan biaya yang cukup mahal.
2. Belum optimalnya sarana dan prasarana angkutan laut untuk ke pulau terluar, sehingga masyarakat kesulitan untuk mengakses daerah tersebut. Seperti yang diatur dalam peraturan bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan

Hilir Pasal 17 tentang Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yaitu menyiapkan bahan penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan dalam Kabupaten yang terletak pada jaringan jalan Kabupaten dan menyiapkan data penetapan lintas penyeberangan dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan Kabupaten.

3. Terdapatnya pelabuhan yang sudah tidak lagi beroperasi, sehingga pelabuhan tersebut menjadi pelabuhan mati. Seperti yang terlihat pada tabel 1.1 dimana 2 pelabuhan sudah tidak berfungsi di Kabupaten Rokan Hilir.
4. Adanya pelabuhan swasta yang di bangun oleh warga setempat yang masih beroperasi dan saat ini menjadi satu – satunya pelabuhan yang masih layak digunakan sehingga masyarakat harus membayar lebih apabila ingin menggunakan pelabuhan tersebut, baik sebagai alat transportasi maupun pengiriman barang dan jasa.
5. Adanya rencana pembangunan pelabuhan pada tahun 2019 namun tidak terlaksana hingga saat ini.

Dari fenomena dan permasalahan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut sehingga menetapkan judul penelitian sebagai berikut: **“Implementasi Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal Dinas Perhubungan Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Rokan Hilir”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mencoba untuk merumuskan perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Implementasi Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal Dinas Perhubungan Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Rokan Hilir?
2. Apasajakah Faktor Penghambat dalam tidak terlaksananya Implementasi Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal Dinas Perhubungan Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Rokan Hilir?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan utama dari penelitian adalah untuk :

- a. Mengetahui dan menganalisis Implementasi Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal Dinas Perhubungan Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Rokan Hilir
- b. Mengetahui dan menganalisis dalam tidak terlaksananya Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal Dinas Perhubungan Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Rokan Hilir.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini secara teoritis, akademis dan empirisnya adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan mampu mengisi dan ikut berpartisipasi dalam perkembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam hal pelayanan publik.
- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan menjadi masukan khususnya bagi Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir untuk meningkatkan fasilitas pelabuhan demi kelancaran transportasi laut.
- c. Secara akademis, dapat menjadikan salah satu bahan referensi bagi mahasiswa lain yang akan melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama.



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Administrasi

Istilah administrasi secara bahasa, administrasi berasal dari kata latin *ad* dan *administrare*, yang berarti “membantu, melayani atau memenuhi”. Di Indonesia kita mengenal dan memaham “administrasi” dari dua bahasa yang berbeda dengan makna yang berbeda pula. *Pertama*, *administratie* dari Bahasa Belanda yang kita kenal sejak awal masuknya pengaruh sistem administrasi publik klasik (system administrasi Negara Prancis atau sistem Administrasi Negara Eropa Barat Kontinental) yang dibawa oleh pemerintah jajahan belanda.

Istilah *administratie* dalam bahasa Belanda mencakup pengertian *stelselmatige verkrijging en verweking van gegevens* (dalam bahasa Indonesia disebut “tata usaha” atau administrasi dalam arti sempit”) administrasi sebagai ketatausahaan yang dalam bahasa inggris dipergunakan istilah *clerical work*, *paper work*, atau *office work* atau administrasi dalam arti sempit ialah berupa kegiatan pencatatan, pengelolaan, pengumpulan, pemberi nomor/kode surat, pengetikan, penggandaan penyimpanan (pengarsipan), pengiriman berbagai informasi yang diterima atau yang dikeluarkan oleh suatu organisasi/institusi.

Menurut Siagian (dalam Syafri 2012; 9) Administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses sama antar dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Sebagaimana dikemukakan diatas bahwa administrasi adalah sebagai suatu proses kerjasama sekurangnya dua orang atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan tersebut diperlukan adanya suatu wadah yang disebut dengan organisasi.

Suminta (2005; 3) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan administrasi keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan organisasi apapun bentuknya, baik itu organisasi public maupun organisasi bisnis.

Menurut Zulkifli (2005; 23) pekerjaan pokok yang dimaksud mencakup unsur-unsur umum administrasi dalam perspektif proses. Adapun unsur-unsur umum administrasi tersebut meliputi:

1. Organisasi (tata keragaan)
2. Manajemen (tata pimpinan)
3. Komunikasi (tata hubungan)
4. Informasi (tata keterangan)
5. Personalia (tata kepegawaian)
6. Finansial (tata keuangan)
7. Material (tata pembekalan)
8. Relasi publik (tata humas)

Administrasi menurut Andry (2015; 10) adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai ketentuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dari batasan tentang administrasi ini terkandung beberapa makna yaitu :

1. Administrasi sebagai seni adalah suatu proses yang diketahui hanya permulaannya sedang akhirnya tidak ada.
2. Administrasi mempunyai suatu unsur – unsur tertentu yaitu adanya dua orang manusia atau lebih, adanya tujuan yang hendak dicapai, adanya tugas yang harus dilaksanakan, adanya peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan tugas – tugas itu (waktu, tempat, peralatan, materi dan lain – lain).
3. Administrasi sebagai proses kerjasama bukan merupakan hal yang baru karena ia telah timbul bersama – sama dengan timbulnya

peradaban manusia. Administrasi sebagai proses adalah suatu proses pelaksanaan kegiatan – kegiatan tertentu yang dimulai sejak adanya dua orang yang bersepakat untuk bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu pula. Kapan proses itu berakhir tidak bisa diketahui karena bila kedua orang itu akan memutuskan untuk tidak bekerjasama lagi tidak ada yang mengetahuinya.

Menjalankan proses administrasi dalam suatu organisasi tidak lepas dari daya unsure manajemen, sebab manajemen merupakan penggerak agar tujuan dari organisasi dapat tercapai secara sfektif dan efesien.

Berapa pendapat diatas maka penulis tertarik untuk kesimpulan bahwa administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama yang baik yang didasarkan atar rasionalitas tertentu guna mencapai tujuan tertentu.

Administrasi memiliki beberapa unsur yang karena adanya unsur ini menjadikan administrasi itu ada. Adapun unsur – unsur administrasi dimaksud oleh Anggara (2012;20) adalah sebagai berikut :

1. Unsur dua orang manusia atau lebih; seseorang tidak dapat bekerja sama dengan dirinya sendiri karena itu harus ada orang lain yang secara sukarela atau dengan cara lain diajak turut serta dalam proses kerjasama itu.
2. Unsur tujuan; tujuan yang hendak dicapai dapat ditentukan oleh semua orang yang terlibat dalam proses administrasi itu. Tujuan tersebut dapat ditentukan oleh sebagian, atau oleh seseorang dari mereka yang terlibat.
3. Unsur tuga dan pelaksanaannya; tugas dan pelaksanaannya akan lebih efisien dan ekonomis apabila semua orang yang terlibat mau bekerja sama satu sama lain.
4. Unsur peralatan dan perlengkapan; peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam suatu proses administrasi tergantung dari berbagai faktor seperti :
 - a. Jumlah orang yang terlibat dalam proses itu
 - b. Sifat tujuan yang hendak dicapai
 - c. Ruang lingkup serta aneka ragamnya tugas yang hendak dijalankan
 - d. Sifat kerjasama yang dapat diciptakan dan dikembangkan.

Disamping itu, dalam pengertian luas administrasi bisa dilihat dari 3 sudut pandang, sehingga menghasilkan 3 pengertian menurut sudut pandangnya masing – masing oleh Anggara (2012;20) yaitu :

1. Dari sudut proses, administrasi merupakan keseluruhan proses pemikiran, pengaturan, penentuan tujuan hingga pelaksanaan kerja sehingga tujuan yang dimaksud dapat tercapai.
2. Dari sudut fungsi, administrasi merupakan keseluruhan aktivitas yang secara sadar dilakukan oleh setiap orang atau sekelompok orang yang berfungsi sebagai administrator atau pemimpin. Dalam kegiatan tersebut terdapat berbagai macam tugas (fungsi) kerja, misalnya tugas perencanaan, tugas mengorganisasi, tugas menggerakkan, tugas mengawasi dan sebagainya.
3. Dari sudut pandang kelembagaan, administrasi ditinjau dari manusia – manusia, baik secara perseorangan maupun kolektif yang menjalankan kegiatan – kegiatan guna mencapai hasil, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun orang – orang pengisi organisasi yang dimaksud dalam 3 defenisi diatas menurut Anggara (2012 ; 21) adalah sebagai berikut :

- a. Administrator : orang yang menentukan dan mempertahankan tujuan
- b. Manajer : orang yang langsung memimpin pekerjaan kearah tercapainya hasil yang nyata
- c. Pembantu ahli (*staff*) : terdiri dari para ahli dalam setiap bidang, selaku penasihat (*brain-trust*) dan berfungsi dibidang karya
- d. Karyawan : para pelaksana dan pekerja yang digerakkan oleh manajer untuk bekerja, guna menghasilkan sesuatu sesuai dengan tujuan.

Mulai dari sini, bisa terlihat bahwa administrasi memiliki ruang lingkup yang bergerak meluas dan tidak hanya sebatas proses ketik mengetik surat, pencacatan atau arti sempit lainnya. Dan ketika diperhatikan lebih seksama, sangat terlihat bahwa administrasi tidak hanya hadir sebagai sebuah proses sederhana yang mudah untuk disepelekan secara legalitas.

2. Konsep Organisasi

Organisasi merupakan salah satu unsur utama bagi kelompok orang yang bekerja sama mencapai tujuan tertentu karena organisasi merupakan wadah (tempat) pengelompokkan orang dan pembagian tugas sekaligus tempat berlangsungnya berbagai macam aktivitas bagi pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan komitmen tertentu.

Ada begitu banyak para ahli yang memberikan pendapat mereka tentang organisasi. Salah satunya adalah Siagian (dalam Andry, 2015; 14) yang menyatakan bahwa organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/ beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.

Selain pengertian diatas menurut Siagian (2008; 96), hakikatnya organisasi itu dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, organisasi dipandang sebagai “wadah” dan organisasi dipandang sebagai “proses”. Dimana ketika organisasi dipandang sebagai wadah maka organisasi merupakan tempat di mana kegiatan – kegiatan administrasi dan manajemen dijalankan. Kemudian ketika organisasi dipandang sebagai proses maka organisasi akan menyoroti interaksi antara orang – orang didalam organisasi itu.

Makmur (2008;108) organisasi terdiri dari dua bagian yang besar, pertama organisasi sebagai wadah atau tempat. Kedua organisasi sebagai proses yang

menggambarkan aktivitas yang akan, sedang atau yang dilaksanakan oleh manusia yang bergabung dalam sebuah organisasi.

Struktur organisasi salah satu variable yang memiliki unsure yang akan diuraikan dalam bagian tersendiri berikut ini. Proses dalam organisasi adalah aktivitas yang memadai adanya kegiatan dalam organisasi tersebut. Proses organisasi menurut Robbins (1994; 89) meliputi:

- a. Hubungan antara peranan, yaitu hubungan formal dalam jalur organisasi antara para anggota sesuai dengan peranan masing-masing.
- b. Pengendalian, yaitu penetapan untuk menilai kemajuan rencana membandingkan hasil yang aktual yang diharapkan.
- c. Koordinasi yaitu proses dimana pemimpin mengembangkan pola yang teratur dari usaha kelompok diantara para bawahannya serta kepastian dan kesatuan tindakan dalam usaha mencapai tujuan.
- d. Pembinaan anggota yaitu usaha berencana meliputi keseluruhan organisasi untuk meningkatkan efektifitas dan kesehatan organisasi serta pendekatan berencana dalam proses organisasi.
- e. Sosialisasi, yaitu proses penerapan nilai dan tata kerja organisasi kepada anggota baru agar mereka berperilaku seperti yang dikehendaki oleh organisasi.

Jadi dapat disimpulkan untuk mencapai tujuan, organisasi sebaiknya membangun dan menjaga hubungan dengan lingkungannya, dengan kata lain dapat juga dikatakan bahwa untuk mencapai tujuan organisasi selain dipengaruhi oleh lingkungan internal organisasi dapat juga dipengaruhi oleh lingkungan eksternal.

3. Konsep Manajemen

Dalam mengartikan dan mendefinisikan manajemen ada berbagai ragam, ada yang mengartikan dengan ketatalaksanaan, manajemen pengurusan dan lain sebagainya. Bila dilihat dari literatur – literatur yang ada, pengertian manajemen menurut Manulang (dalam Zulkifli, 2015; 4) dapat dilihat dari tiga pengertian :

1. Manajemen sebagai suatu proses
2. Manajemen sebagai suatu kolektivitas manusia
3. Manajemen sebagai ilmu (*science*) dan sebagai seni (*art*)

Manajemen sebagai suatu proses, melihat bagaimana cara orang untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Pengertian manajemen sebagai suatu proses dapat dilihat dari pengertian menurut :

1. *Encyclopedia of the Social Science*, yaitu suatu proses dimana pelaksanaan suatu tujuan tertentu dilaksanakan dan diawasi.
2. Haiman, manajemen yaitu fungsi untuk mencapai suatu tujuan melalui kegiatan orang lain, mengawasi usaha – usaha yang dilakukan individu untuk mencapai tujuan.
3. Georgy R. Terry, yaitu cara pencapaian tujuan yang telah ditentukan terlebih dengan melalui kegiatan orang lain. (dalam Zulkifli, 2015; 5)

Manajemen suatu kolektivitas yaitu merupakan suatu kumpulan dari orang – orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Kolektivitas atau kumpulan orang – orang inilah yang disebut dengan manajemen, sedangkan orang yang bertanggung jawab terhadap terlaksananya suatu tujuan atau berjalannya aktivitas manajemen disebut Manager.

Manajemen sebagai suatu ilmu dan seni, melihat bagaimana aktivitas manajemen dihubungkan dengan prinsip – prinsip dari manajemen. Manajemen yaitu koordinasi semua sumber daya melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penetapan tenaga kerja, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

4. Konsep Kebijakan

Kebijakan pemerintah sangat terkait dengan masalah – masalah publik atau masalah – masalah pemerintah yang ada pada suatu Negara. Kenyataannya

kebijakan telah banyak membantu para pelaksana pada tingkat birokrasi pemerintah maupun para politisi untuk memecahkan masalah – masalah publik. Kebijakan publik dapat dikatakan merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan oleh pemerintah demi kepentingan kelompok – kelompok yang kurang beruntung.

Pengertian dari kebijakan dikemukakan oleh Anderson (Wahab, 2005:3) sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi. Konsep tersebut membedakan secara tegas antara kebijakan (policy) dan keputusan (*decision*), yang mengandung arti pemilihan di antara sejumlah alternative yang tersedia.

Menurut Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) (Wahab, 2005:2), kebijakan diartikan sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman itu boleh jadi amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau sempit, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas – aktivitas tertentu atau suatu rencana.

Salah satu pengertian mengenai kebijakan publik diberikan oleh Thomas R Dye (Santoso, 2009:27) yang mendefenisikan sebagai *whatever government choose to do or not to do* (pilihan pemerintah untuk bertindak atau tidak bertindak). Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu harus ada tujuannya dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan

pemerintah, jadi bukan semata – mata merupakan pertanyaan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.

Pengertian lainnya dikemukakan oleh Harold Laswell dan Abraham Kaplan (Nugroho, 2008:53) yang mendefenisikan kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan – tujuan tertentu, nilai – nilai tertentu, dan praktik – praktik tertentu (*a projected program of goals, values, and practices*). Selanjutnya Carl I. Friedrich (Nugroho, 2008:53) mendefinisikannya sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada. Kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Lebih lanjut Richard Rose (Winarno, 2012:20) menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi – konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri. Berdasarkan defenisi ini Rose menegaskan bahwa kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekedar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Sedangkan Chaizi Nasucha (Pasolong, 2010:39) berpendapat bahwa kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan ke dalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis. Selanjutnya Robert Eyestone (Winarno, 2012:20) mengatakan bahwa

“Secara luas” kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya”.

Riant Nugroho (2008:55) merumuskan definisi yang sederhana bahwa kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan. kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita – citakan.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah aturan/kegiatan/program yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan tersebut mempunyai arah atau pola kegiatan dalam rangka mencapai tujuan tertentu agar tercipta hubungan yang harmonis antara pemerintah dan lingkungannya.

5. Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Ripley dan Franklin (Winarno, 2012:148) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang – undang ditetapkan yang memberikan otoritas program kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis pengeluaran yang nyata (*tangible output*).

Sedangkan menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (Wahab, 2005:65) implementasi kebijakan didefinisikan sebagai memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan

merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Sementara itu, Grindle (Winarno, 2012:149) juga memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya “sebuah sistem pengiriman kebijakan”, di mana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan.

Selanjutnya, Van Meter dan Van Horn (Wahab, 2005:65) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Implementasi merupakan tindakan – tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan, akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak

bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat (Edward III dalam Winarno, 2012:177).

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan implementasi kebijakan dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden) yang diarahkan pada tercapainya tujuantujuan yang diharapkan.

Penggunaan model implementasi dalam rangka keperluan penelitian/ analisis sedikit banyak akan bergantung pada kompleksitas yang dikaji serta tujuan dan analisis itu sendiri. Terdapat beberapa model implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh para ahli, diantaranya yaitu:

1. Model Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter dan Van Horn

Model implementasi Donald Van Meter dan Carl Van Horn (Nugroho, 2008:438) mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variable yang mempengaruhi kebijakan publik adalah variable berikut:

- a. Aktivitas implementasi dan komunikasi antarorganisasi.
- b. Karakteristik agen pelaksana/implementor.
- c. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik.
- d. Kecendrungan (disposition) pelaksana/implementor.

2. Model Implementasi Kebijakan Mazmanian dan Sabatier

Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (Wahab, 2005:81) berpendapat bahwa peran penting dari analisis implementasi kebijaksanaan negara ialah

mengidentifikasi variable-variable yang mempengaruhi tercapainya tujuantujuan formal pada proses implementasi. Variable-variable yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kategori besar, yaitu:

- a. Mudah tidaknya masalah yang akan digarap dikendalikan.
- b. Kemampuan keputusan kebijaksanaan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasinya, dan
- c. Pengaruh langsung berbagai variable politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang memuat dalam keputusan kebijaksanaan tersebut.

3. Model Implementas Kebijakan George C. Edward III

Model implementasi kebijakan selanjutnya adalah model yang dikembangkan oleh George Edward III. Menurut George Edward III (Winarno, 2012:177) mengemukakan bahwa dalam implementasi kebijakan diperlukan variabel- variabel pelaksanaan yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu :

a. Komunikasi

Komunikasi memegang peranan penting dalam proses kebijakan, yaitu transmisi, konsistensi dan kejelasan (clarity). Persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah itu dapat diikuti. Komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para

pelaksana. Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi inipun cenderung tidak efektif.

b. Sumber Daya

Sumber – Sumber dapat merupakan faktor yang penting, meliputi staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, keefektifan wewenang, dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

c. Kecenderungan dari pelaksana kebijakan

Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.

d. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi yang melaksanakan kebijakan mempunyai pengaruh penting pada implementasi. Salah satu dari aspek-aspek struktural paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja ukuran dasarnya (Standard Operating Procedure, SOP). Prosedur-prosedur biasa ini dalam menanggulangi keadaan-keadaan umum digunakan dalam organisasi- organisasi publik dan swasta, dengan menggunakan SOP para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia. Selain itu, SOP juga menyeragamkan tindakan-tindakan dari para

pejabat dalam organisasi- organisasi yang kompleks dan tersebar luas, yang pada gilirannya dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar, dan menghindari fragmentasi organisasi.

6. Konsep Koordinasi

Dalam sebuah organisasi setiap pimpinan perlu untuk mengkoordinasikan kegiatan kepada anggota organisasi yang diberikan dalam menyelesaikan tugas. Dengan adanya penyampaian informasi yang jelas, pengkomunikasian yang tepat, dan pembagian pekerjaan kepada para bawahan oleh manajer maka setiap individu bawahan akan mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan wewenang yang diterima. Tanpa adanya koordinasi setiap pekerjaan dari individu karyawan maka tujuan perusahaan tidak akan tercapai.

Hasibuan (2006:85) berpendapat bahwa : “Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi”.

Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatankegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen-departemen atau bidangbidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif (Handoko 2003 : 195).

Menurut G.R Terry dalam Hasibuan (2006 : 85) berpendapat bahwa koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

Koordinasi menurut Hasibuan (2007:86) adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Koordinasi merupakan kegiatan untuk mengimbangi dan menggerakkan tim dengan membeikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan ini dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Ndraha (2003:291) dalam bukunya yang berjudul *Kybernology*, Koordinasi dapat didefinisikan sebagai proses penyepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa sehingga di sisi yang satu semua kegiatan atau unsur itu terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dan di sisi lain keberhasilan yang satu tidak merusak keberhasilan yang lain.

Menurut E. F. L. Brech dalam bukunya, *The Principle and Practice of Management* yang dikutip Handayani (2002:54) Koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok kepada masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri.

Sedangkan menurut G. R. Terry dalam bukunya, *Principle of Management* yang dikutip Handayani (2002:55) koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron atau teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan

mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

Menurut tinjauan manajemen, koordinasi menurut Terry meliputi :

1. Jumlah usaha baik secara kuantitatif, maupun secara kualitatif
2. Waktu yang tepat dari usaha-usaha tersebut
3. Directing atau penentuan arah usaha-usaha tersebut

Berdasarkan defenisi di atas maka dapat disebutkan bahwa koordinasi memiliki syarat-syarat yakni :

1. *Sense of Cooperation*, perasaan untuk saling bekerja sama, dilihat per bagian.
2. *Rivalry*, dalam organisasi besar, sering diadakan persaingan antar bagian, agar saling berlomba
3. *Team Spirit*, satu sama lain per bagian harus saling menghargai.
4. *Esprit de Corps*, bagian yang saling menghargai akan makin bersemangat.

Selanjutnya koordinasi memiliki sifat-sifat sebagai berikut :

1. Koordinasi adalah dinamis, bukan statis.
2. Koordinasi menekankan pandangan menyeluruh oleh seorang manajer dalam kerangka mencapai sasaran.
3. Koordinasi hanya meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan.

Berdasarkan pengertian di atas jelaslah bahwa koordinasi adalah tindakan seorang pimpinan untuk mengusahakan terjadinya keselarasan, antara tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau bagian yang satu dengan bagian

yang lain. Dengan koordinasi ini diartikan sebagai suatu usaha ke arah keselarasan kerja antara anggota organisasi sehingga tidak terjadi kesimpang siuran, tumpang tindih. Hal ini berarti pekerjaan akan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Jadi dapat disimpulkan bahwa koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan dan aktivitas di dalam suatu perusahaan atau organisasi agar mempunyai keselarasan di dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, pengkoordinasian dimaksudkan agar para manajer mengkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki organisasi tersebut. Kekuatan suatu organisasi tergantung pada kemampuannya untuk menyusun berbagai sumber dayanya dalam mencapai suatu tujuan.

Umumnya organisasi memiliki tipe koordinasi yang dipilih dan disesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi-kondisi tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan tugas agar pencapaian tujuan tercapai dengan baik. Hasibuan (2006:86) berpendapat bahwa tipe koordinasi di bagi menjadi dua bagian besar yaitu koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal. Kedua tipe ini biasanya ada dalam sebuah organisasi. Makna kedua tipe koordinasi ini dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini:

1. Koordinasi vertikal (*Vertical Coordination*) adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Tegasnya, atasan mengkoordinasi semua aparat yang ada di bawah tanggung jawabnya secara langsung. Koordinasi vertikal ini secara relatif mudah dilakukan, karena atasan dapat memberikan sanksi kepada aparat yang sulit diatur.
2. Koordinasi horizontal (*Horizontal Coordination*) adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi (aparat) yang setingkat. Koordinasi horizontal ini dibagi atas *interdisciplinary* dan *interrelated*.

Interdisciplinary adalah suatu koordinasi dalam rangka mengarahkan, menyatukan tindakan-tindakan, mewujudkan, dan menciptakan disiplin antara unit yang satu dengan unit yang lain secara intern maupun ekstern pada unit-unit yang sama tugasnya. Sedangkan Interrelated adalah koordinasi antar badan (instansi) beserta unit-unit yang fungsinya berbeda, tetapi instansi yang satu dengan yang lain saling bergantung atau mempunyai kaitan secara intern atau ekstern yang levelnya setaraf. Koordinasi horizontal ini relatif sulit dilakukan, karena coordinator tidak dapat memberikan sanksi kepada pejabat yang sulit diatur sebab kedudukannya setingkat.

Hasibuan (2006:88), berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi sebagai berikut:

1. Kesatuan Tindakan

Pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu konsep kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi.

Kesatuan dari pada usaha, berarti bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Kesatuan tindakan ini adalah merupakan suatu kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu dimaksudkan bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah dirncanakan.

2. Komunikasi

Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, karena komunikasi, sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi. Komunikasi

merupakan salah satu dari sekian banyak kebutuhan manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya. “Perkataan komunikasi berasal dari perkataan *communicare*, yaitu yang dalam bahasa latin mempunyai arti berpartisipasi ataupun memberitahukan”

Dalam organisasi komunikasi sangat penting karena dengan komunikasi partisipasi anggota akan semakin tinggi dan pimpinan memberitahukan tugas kepada karyawan harus dengan komunikasi. Dengan demikian komunikasi merupakan hubungan antara komunikator dengan komunikan dimana keduanya mempunyai peranan dalam menciptakan komunikasi. Dari pengertian komunikasi sebagaimana disebut di atas terlihat bahwa komunikasi itu mengandung arti komunikasi yang bertujuan merubah tingkah laku manusia. Karena sesuai dengan pengertian dari ilmu komunikasi, yaitu suatu upaya yang sistematis untuk merumuskan secara tegas azas-azas, dan atas dasar azas-azas tersebut disampaikan informasi serta dibentuk pendapat dan sikap.

Maka komunikasi tersebut merupakan suatu hal perubahan suatu sikap dan pendapat akibat informasi yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain. Sehingga dari uraian tersebut terlihat fungsi komunikasi sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan dan menyebarkan informasi mengenai kejadian dalam suatu lingkungan.
- b. Menginterpretasikan terhadap informasi mengenai lingkungan
- c. Kegiatan mengkomunikasikan informasi, nilai dan norma sosial dari generasi yang satu ke generasi yang lain.

Maka dari itu komunikasi itu merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah sikap dan perilaku orang lain dengan melalui informasi atau pendapat atau pesan atau idea yang disampaikannya kepada orang tersebut.

7. Konsep Pelabuhan

Definisi suatu pelabuhan menurut Fair (2012:1) yakni “... *port is a place which regularly provides accommodations for the transfer of passengers and/or goods to and from water carriers*”.

Pelabuhan pada umumnya terletak di perbatasan antara laut dengan daratan, atau terletak di sungai atau danau. Pelabuhan menurut Fair terdiri dari tiga bagian, yaitu:

1. Perairan atau kolam yang menyediakan tempat berlindung;
2. Fasilitas waterfront seperti tambatan, dermaga, gudang atau fasilitas pelayanan penumpang, muatan, bahan bakar, bahan pasokan untuk kapal;
3. Peralatan apung seperti kapal-kapal penolong dan alat angkat di perairan.

Definisi tersebut menambahkan lokasi perairan (*anchorage area*) tempat kapal menunggu gilirannya bertambat untuk bongkar muat sebagai bagian dari fasilitas pelabuhan. Biasanya pelabuhan mempunyai antarmuka (*interface*) sebagai layanan penghubung antar jenis alat transportasi.

Hopkins (2012:2) juga berpandangan bahwa area “parkir” sementara bagi kapal yang menunggu giliran untuk dimuat dan/atau di bongkar adalah bagian dari

pelabuhan tanpa terpengaruh oleh jarak antara lokasi labuh jangkar tersebut dengan tempat bertambat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, pelabuhan diartikan sebagai tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

Sedangkan pengertian dari kepelabuhanan menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intramoda dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.

Pelabuhan sebagai prasarana transportasi yang mendukung kelancaran sistem transportasi laut memiliki fungsi yang erat kaitannya dengan faktor-faktor sosial dan ekonomi. Secara ekonomi, pelabuhan berfungsi sebagai salah satu penggerak roda perekonomian karena menjadi fasilitas yang memudahkan distribusi hasil-hasil produksi sedangkan secara sosial, pelabuhan menjadi fasilitas publik dimana didalamnya berlangsung interaksi antar pengguna (masyarakat)

termasuk interaksi yang terjadi karena aktivitas perekonomian. Secara lebih luas, pelabuhan merupakan titik simpul pusat hubungan (central) dari suatu daerah pendukung (hinterland) dan penghubung dengan daerah di luarnya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, secara umum pelabuhan memiliki fungsi sebagai link, interface, dan gateway.

1. Link (mata rantai) yaitu pelabuhan merupakan salah satu mata rantai proses transportasi dari tempat asal barang ke tempat tujuan.
2. Interface (titik temu) yaitu pelabuhan sebagai tempat pertemuan dua mode transportasi, misalnya transportasi laut dan transportasi darat.
3. Gateway (pintu gerbang) yaitu pelabuhan sebagai pintu gerbang suatu negara, dimana setiap kapal yang berkunjung harus mematuhi peraturan dan prosedur yang berlaku di daerah dimana pelabuhan tersebut berada.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 bab II pasal 4 tentang kepelabuhanan, pelabuhan memiliki peran sebagai:

1. Simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya;
2. Pintu gerbang kegiatan perekonomian;
3. Tempat kegiatan alih moda transportasi;
4. Penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan;
5. Tempat distribusi, produksi, dan konsolidasi muatan atau barang; dan mewujudkan wawasan nusantara dan kedaulatan Negara

Sedangkan Fasilitas pelabuhan terbagi atas dua, yaitu :

1. Fasilitas pokok pelabuhan yang meliputi :

- a. Perairan tempat labuh
 - b. Kolam labuh
 - c. Alih muat antar kapal
 - d. Dermaga
 - e. Terminal penumpang
 - f. Pergudangan
 - g. Lapangan penumpukan
 - h. Terminal peti kemas
 - i. Perkantoran untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa
 - j. Fasilitas bunker
 - k. Instalasi air, listrik, dan telekomunikasi
 - l. Jaringan jalan dan rek kereta api
 - m. Fasilitas pemadam kebakaran
 - n. Tempat tunggu kendaraan bermotor
2. Fasilitas penunjang pelabuhan yang meliputi :
- a. Kawasan perkantoran untuk pengguna jasa pelabuhan
 - b. Sarana umum
 - c. Tempat penampungan limbah
 - d. Fasilitas pariwisata, pos dan telekomunikasi
 - e. Fasilitas perhotelan dan restoran
 - f. Areal pengembangan pelabuhan
 - g. Kawasan perdagangan
 - h. Kawasan industry.

8. Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir

Dinas Perhubungan daerah Kabupaten Rokan hilir merupakan salah satu Dinas yang ada di Kabupaten Rokan Hilir yang menjadi unsur pelaksana sebagian urusan Pemerintah daerah Rokan Hilir di bidang Perhubungan.

Dinas Perhubungan ini memiliki peran yang sangat penting bagi Kabupaten Rokan Hilir yang sedang mengembangkan daerahnya dengan didasari oleh Otonomi Daerah. Dinas Perhubungan mengatur jalannya perhubungan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir, baik yang melalui jalur darat, laut dan udara. Dinas Perhubungan juga mengatur tentang hal yang berhubungan dengan Telekomunikasi, Pos dan Giro yang berada di wilayah Kabupaten Rokan Hilir.

Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah dalam bidang Perhubungan Laut, Darat, Udara, Pos dan Telekomunikasi. adapun mengenai struktur organisasi dan tugas dan fungsi dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir dijelaskan dalam peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir. Tipologi Dinas Perhubungan ditetapkan sebagai Dinas Perhubungan Kabupaten Tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 2 (dua) bidang, dengan susunan organisasi terdiri dari :

1. Kepala
2. Sekretariat
 - a. Sub Bidang Ketatausahaan
 - b. Sub Bidang Perencanaan dan Program
3. Bidang Perhubungan Darat
 - a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat
 - c. Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana Angkutan Darat
4. Bidang Perhubungan Laut dan Udara
 - a. Seksi lalu lintas angkutan laut
 - b. Seksi sarana dan prasarana perhubungan laut
 - c. Seksi perhubungan udara
5. Unit Pelaksanaan Teknis Darat (UPTD)
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Sedangkan tugas dan fungsi dari masing – masing bagian dijelaskan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah Kabupaten berdasarkan asas otonomi dan pembantuan di bidang perhubungan.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Dinas Perhubungan mempunyai fungsi sebagai pengorganisasian, pelayanan umum dan teknis, pengendalian, pembinaan dan bimbingan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi, pelaksanaan lapangan, pembiayaan, penelitian dan pengkajian serta pelaporan.

2. Sekretariat

Sekretariat dinas perhubungan dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas membantu kepala Dinas dalam melaksanakan urusan kesekretariatan dan merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di Lingkungan dinas Perhubungan. Untuk melaksanakan tugas, sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan kegiatan administrasi kepegawaian, umum, perlengkapan, program dan keuangan dinas.
- b. Penyusun rencana kerja dan membuat laporan tahunan
- c. Pengkoordinasian, membina dan merumuskan program kerja tahunan di lingkungan dinas,
- d. Mewakili kepala dinas apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak berada ditempat
- e. Pengkoordinasian dan mengarahkan kegiatan sub bagian.
- f. Pengkoordinasian, mengarahkan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk administrasi keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, umum dan rumah tangga serta penyusunan program di lingkungan dinas.
- g. Pengkoordinasian dan melaksanakan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan,
- h. Pengkoordinasian, membina, merumuskan, laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggung jawaban dinas
- i. Pengkoordinasian, membina, pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor
- j. Pendistribusian tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing – masing
- k. Pengevaluasi tugas sekretariat berdasarkan informasi, data laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut
- l. Pelaporan pelaksanaan tugas sekretariat kepada atasan secara lisan maupun tertulis.

- m. Fasilitasi dan asistensi tugas secretariat dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis.
- n. Pengevaluasi tugas sekretaris, berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.
- o. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perhubungan Laut dan Udara

Kepala bidang yang mempunyai tugas membantu kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang perhubungan laut dan udara.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, kepala Bidang Perhubungan Laut dan Udara mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan tugas – tugas yang dilaksanakan secara terprogram dan sistematis dalam skala harian, mingguan, bulanan maupun tahunan.
- b. Menganalisa tugas yang dikerjakan dengan cara membaca disposisi, isi surat, dokumen lain atau program kerja masing – masing seksi untuk menentukan prioritas tugas.
- c. Mendelegasikan tugas yang diberikan pimpinan kepada kepala seksi
- d. Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan dengan cara langsung atau tulisan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas
- e. Meneliti dan mengkaji program kerja masing – masing seksi dengan cara membaca, mengoreksi dan memberikan catatan agar dapat ditetapkan program kerja / kegiatan sesuai dengan ketentuan.
- f. Menyusun program kerja kegiatan anggaran pada bidang perhubungan laut dan udara sebagai bahan usulan kegiatan Dinas Perhubungan
- g. Meneliti dan menganalisa secara cermat konsep surat/ dokumen lain yang disusun bawahan untuk mengetahui kebenaran materi, format, ketikan dan pembubuhan paraf sebelum diajukan kepada pimpinan.
- h. Menyusun konsep petunjuk pelaksanaan kegiatan dan petunjuk teknis dalam hal bidang perhubungan laut dan udara.
- i. Melakukan pengawasan terhadap perizinan angkutan laut, pemeliharaan, pengadaan serta penentuan lokasi dan penghapusan rambu lalu lintas pelayaran, alat pemberi isyarat pelayaran dan keselamatan pelayaran.
- j. Melaksanakan penilaian prestasi kinerja bawahan dengan menggunakan instrument sasaran kerja pegawai (SKP)
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala dinas.

4. Seksi sarana dan prasarana perhubungan laut

Kepala seksi sarana dan prasarana perhubungan laut mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan pengolahan pelabuhan lokal lama
2. Menyelenggarakan pengolahan pelabuhan baru yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten.
3. Menyiapkan rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional hubungan internasional dan nasional.
4. Menyiapkan penetapan rencana induk pelabuhan lokal.
5. Menyiapkan rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum dan pelabuhan khusus
6. Menyiapkan penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut lokal dan khusus lokal.
7. Menyiapkan penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut lokal dan penetapan izin pengoperasian pelabuhan khusus lokal
8. Menyiapkan bahan rekomendasi penetapan DLKr (Daerah Lingkungan Kepentingan Kerja) DLKp (Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan) pelabuhan laut internasional hubungan, dan internasional serta pelabuhan laut nasional dan regional.
9. Menyiapkan penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal
10. Melakukan pertimbangan teknis terhadap penambahan dan atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut lokal
11. Melakukan analisa dan menyiapkan bahan pemberian izin kegiatan pengerukan dan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal
12. Menyiapkan penetapan DUKS di pelabuhan lokal
13. Melakukan proses rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan pelayaran lokal (kabupaten)
14. Menyiapkan izin kegiatan pengerukan dan reklamasi di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal
15. Menyelenggarakan penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan laut lokal dan pelabuhan khusus lokal
16. Menyiapkan rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri.
17. Melakukan perhitungan cermat terhadap penetapan besara tarif jasa kepelabuhan pada pelabuhan lokal yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten
18. Menyelenggarakan proses izin usaha tally dan izin proses bongkar muat barang dipelabuhan.
19. Menyelenggarakan proses izin usaha ekspedisi/ freight forwarder
20. Mendorong pengembangan kawasan perdagangan, kawasan industry dan pusat kegiatan perekonomian lainnya.
21. Mengawasi terjaminnya kelestarian lingkungan di pelabuhan
22. Menjamin keselamatan dan keamanan pelabuhan
23. Menyediakan dan memelihara infrastruktur yang menghubungkan pelabuhan dengan kawasan perdagangan, kawasan industry dan pusat kegiatan perekonomian lainnya.
24. Menyiapkan bahan penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau dalam kabupaten.

25. Menyiapkan bahan penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten.
26. Menyiapkan daya penetapan lintas penyeberangan dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten.
27. Menyiapkan proses pengadaan kapal SDP
28. Menyiapkan data – data penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan
29. Menyiapkan data – data penetapan pelabuhan sungai dan danau
30. Menyiapkan rekomendasi pembangunan pelabuhan SDP
31. Menyelenggarakan kegiatan pelabuhan penyeberangan dan pelabuhan sungai dan danau.
32. Menyiapkan data – data penetapan rencana induk DLKr/DLKp pelabuhan SDP yang terletak pada jaringan jalan kabupaten
33. Menyelenggarakan pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan rambu penyeberangan
34. Menyiapkan izin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpon) jaring terapung dan kerambah di sungai dan danau
35. Menyelenggarakan pembangunan pemeliharaan pengerukan alur pelayaran sungai dan danau kabupaten
36. Menyiapkan data – data dalam penetapan besaran tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten.
37. Menyiapkan data – data penetapan tariff angkutan sungai dan danau kelas ekonomi dalam kabupaten
38. Melakukan pengawasan pelaksanaan tarif jasa angkutan SDP dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten.
39. Menyiapkan data – data penetapan besaran tarif jasa pelabuhan SDP yang tidak diusahakan yang dikelola kabupaten.
40. Menyelenggarakan proses persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan pada jaringan jalan kabupaten.
41. Melakukan pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau serta angkutan penyeberangan dalam kabupaten pada jaringan jalan Kabupaten.
42. Menerbitkan sertifikat keselamatan kapal yang berukuran tonase kotor kurang dari (GT7) yang berlayar hanya di perairan daratan sungai atau danau.
43. Menyiapkan bahan pas penerbitan pas perairan daratan dan penerbitan dokumen pengawakan kapan yang berukuran tonase kotor kurang dari (GT7) yang berlayar hanya diperairan daratan sungai atau danau
44. Menyelenggarakan pemeriksaan permesinan dan perlengkapan kapal yang berukuran tonase kotor kurang dari (GT7) yang berlayar hanya diperairan daratan sungai, atau danau
45. Menyiapkan bahan surat izin berlayar yang berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari (GT7) yang berlayar hanya di perairan daratan sungai dan danau

46. Memberikan surat izin berlayar terhadap kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari (GT7) yang berlayar hanya diperairan daratan sungai dan danau
47. Menyiapkan bahan penerbitan sertifikat keselamatan kapal dan menyelenggarakan pengawasan keselamatan kapal yang berukuran tonase kotor kurang dari (GT7) yang berlayar dilaut
48. Menyiapkan bahan penerbitan sertifikat dokumen pengawasan kapan dan penerbitan pas kecil terhadap kapal yang berukuran tonase kotor kurang dari (GT7) yang di laut.
49. Menyelenggarakan pengukuran kapal dan pencatatan kapal dalam buku register pas kecil terhadap kapal yang berukuran tonase kotor kurang dari (GT7) yang di laut.
50. Melaksanakan pemeriksaan terhadap permesinan kapal, konstruksi kapal dan perlengkapan kapal yang berukuran tonase kotor kurang dari (GT7) yang di laut
51. Menetapkan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alta pengawasan dan alat pengamanan (rambu – rambu), danau dan sungai lintas kabupaten.

Unit Pelaksana teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagian unsur pelaksana teknis operasional dinas. Unit Pelaksana Teknik Dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Unit Pelaksana Teknik Dinas dapat dibentuk setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan oleh Kepala Daerah. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan sesuai keahliannya.

Kelompok fungsional ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas Perhubungan oleh Kepala Daerah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usulan dari Sekretaris Daerah. Kepala Dinas, Kepala Sub Dinas, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Unit Pelaksana teknis Dinas dan Kelompok Jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usulan Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Sub Bagiab Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Seksi wajib mennerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan Pemerintahan serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

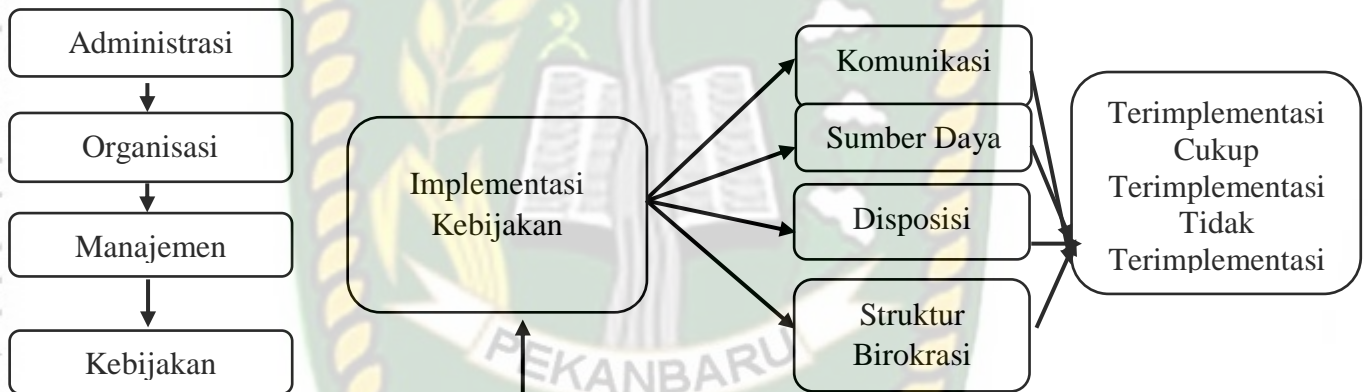
Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Kepala Dinas wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing, dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan dinasny. Semua biaya untuk pelaksanaan tugas dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir serta subsidi atau bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan lembaga lain di luar Pemerintah yang sah.

B. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan variable penelitian kemudian diukur dengan teori yang dijadikan sebagai indikator serta fenomena yang terjadi maka penulis akan menjelaskan unsure tersebut agar tidak terjadi kesalahan dan penafsiran makna.

Adapun untuk melihat sebagaimana Implementasi Rencana Pembangunan Pelabuhan Pengumpul Lokal di Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir, penulis menggunakan teori Edward III (Dalam Winarno, 2012:177) dimana ada empat indikator dalam mengukur Implementasi yaitu: Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan struktur birokrasi. Atas dasar ini penulis jadikan indikator dalam peneliti.

Gambar II.1: Kerangka Pikiran Penelitian Implementasi Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal Dinas Perhubungan Oleg Dinas PUPR Kabupaten Rokan Hilir



Sumber : Modifikasi Penulis, tahun 2019

C. Hipotesis

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Diduga rendahnya Implementasi Rencana Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal di Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir dilihat dari indikator Komunikasi, sumberdaya, pelaksana dan struktur birokrasi.

D. Konsep Operasional

Untuk memberikan suatu pemahaman agar mudah penelitian, maka perlu adanya beberapa batasan penilaian dan focus penelitian ini yang dioperasionalkan melalui Indikator sebagai berikut.

1. Administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses sama antar dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/ beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.
3. Manajemen dapat disimpulkan dari sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagi kegiatan dalam rangka menetapkan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan seseorang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka mencapai tujuan melalui kegiatan-kegiatan dalam organisasi.
4. Rancang bangun merupakan serangkaian prosedur untuk menterjemahkan hasil analisis dari sebuah system kedalam bahasan pemograman untuk mendeskripsikan dengan detail bagaimana komponen – komponen system diimplementasikan. Sedangkan pengertian bangun atau pembangunan system adalah kegiatan menciptakan baru maupun mengganti atau memperbaiki sistem yang telah ada baik secara keseluruhan maupun sebagian.
5. Pelabuhan sebagai prasarana transportasi yang mendukung kelancaran sistem transportasi laut memiliki fungsi yang erat kaitannya dengan faktor-faktor sosial dan ekonomi.

6. Dinas Perhubungan daerah Kabupaten Rokan hilir merupakan salah satu Dinas yang ada di Kabupaten Rokan Hilir yang menjadi unsur pelaksana sebagian urusan Pemerintah daerah Rokan Hilir di bidang Perhubungan.
7. Fasilitas yang dimaksud adalah seluruh fasilitas yang ada pada pelabuhan pelayaran lokal baik fasilitas pokok maupun fasilitas tambahan.
8. Kebijakan adalah langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.
9. Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.
10. Komunikasi kebijakan adalah suatu aktivitas yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan.
11. Sumber daya adalah penggerak dan pelaksana kegiatan. Sumberdaya merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu implementasi. Sumber daya terdiri dari fasilitas dan informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan guna tercapainya suatu implementasi.
12. Disposisi adalah sikap para pelaksana dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi sangat penting, karena kinerja

pelaksanaan kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri – ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaanya, dimana kualitas dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas atau ciri – ciri dari para aktor, kualitas tersebut adalah tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja dan integritas moralnya.

13. Struktur Birokrasi adalah sumber – sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan atau para pelaksana mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Struktur organisasi dalam suatu badan sangat berperan penting dimana untuk menentukan keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan dibutuhkan suatu struktur organisasi yang tertata rapih guna tercapainya suatu tujuan yang telah disepakati bersama.

E. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi Variabel penelitian Tentang Implementasi Rencana Pembangunan Pelabuhan Pengumpul Lokal di Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir.

Tabel II.1: Tabel Operasionalisasi Variabel Implementasi Pembangunan Pelabuan Pengumpan Lokal Dinas Perhubungan Oleh Dinas PUPR Kabupaten Rokan Hilir

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penelitian	Skala
1	2	3	4	5
Implementasi merupakan tindakan – tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan, akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan	Implementasi	Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi kebijakan - Kejelasan - Koordinasi 	Terimplementasi Cukup Terimplementasi Kurang Terimplementasi
		Sumber daya	<ul style="list-style-type: none"> - Sumber daya manusia - Sumber daya biaya - Sumber daya waktu 	Terimplementasi Cukup Terimplementasi Kurang Terimplementasi
		Disposisi	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat pendidikan pelaksana - Kompetensi - Integritas moralnya 	Terimplementasi Cukup Terimplementasi Kurang Terimplementasi
		Struktur Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Tugas dan fungsi - SOP - Struktur organisasi 	Terimplementasi Cukup Terimplementasi Kurang Terimplementasi

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penelitian	Skala
1	2	3	4	5
dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat (Edward III dalam Winarno, 2012:177)				

Sumber : Data Olahan Penulis 2019

F. Teknik Pengukuran

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dengan alat ukur, sehingga dapat menghasilkan data kuantitatif. Untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi orang atau sekelompok orang digunakan skala *likert* (Sugiyono, 2007). Dengan skala likert, variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel yang kemudian dijadikan titik tolak untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.

Dalam penelitian ini skala *Likert* yang digunakan untuk Implementasi Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal dengan 3 kategori yaitu: Terimplementasi (skor 3), Cukup Terimplementasi (skor 2), Kurang Terimplementasi (skor 1).

Sebelum menganalisa deskriptif penelitian ini, akan di buat tabel rentang skala yang menjadi acuan dalam analisis deskriptif. Sampel yang dipakai dalam penelitian ini berjumlah 18 responden yang terdiri dari 11 orang berasal dari

Dinas Perhubungan dan 5 Orang berasal dari Dinas PUPR dan banyaknya alternative jawaban berjumlah 3 (Terimplementasi, Cukup Terimplementasi dan Kurang Terimplementasi), maka:

- Skor terendah = bobot terendah x jumlah sampel x jumlah pertanyaan
- Skor tertinggi = bobot tertinggi x jumlah sampel x jumlah pertanyaan

Sedangkan untuk menentukan rentang skala menggunakan rumus:

$$\text{Rentang Skala (interval)} = \frac{\text{Skor tertinggi} - \text{skor terendah}}{\text{alternatif jawaban}}$$

A. Dinas Perhubungan

1. Variabel Implementasi jumlah responden adalah 11 orang dan jumlah pertanyaan yang diajukan 12 pertanyaan. Nilai tertinggi dari jawaban responden adalah $3 \times 11 \times 12 = 396$, sedangkan nilai terendah adalah $1 \times 11 \times 12 = 132$. Dengan demikian interval untuk 3 kategori adalah $(396 - 132) / 3 = 88$. Dari interval diatas dikategorikan skor jawaban responden sebagai berikut :

No	Kriteria Skor	Rentang Skor
1	Terimplementasi	309 – 396
2	Cukup Terimplementasi	221 – 308
3	Kurang Terimplementasi	132 – 220

2. Indikator Komunikasi jumlah responden adalah 11 orang dan jumlah pertanyaan yang diajukan 3 pertanyaan. Nilai tertinggi dari jawaban responden adalah $3 \times 11 \times 3 = 99$, sedangkan nilai terendah adalah $1 \times 11 \times 3 = 33$. Dengan demikian interval untuk 3 kategori adalah $(99 - 33) / 3 = 22$. Dari interval diatas dikategorikan skor jawaban responden sebagai berikut :

No	Kriteria Skor	Rentang Skor
1	Terimplementasi	78 - 99
2	Cukup Terimplementasi	56 – 77
3	Kurang Terimplementasi	33 – 55

3. Indikator Sumber Daya jumlah responden adalah 11 orang dan jumlah pertanyaan yang diajukan 3 pertanyaan. Nilai tertinggi dari jawaban responden adalah $3 \times 11 \times 3 = 99$, sedangkan nilai terendah adalah $1 \times 11 \times 3 = 33$. Dengan demikian interval untuk 3 kategori adalah $(99-33)/3 = 22$. Dari interval diatas dikategorikan skor jawaban responden sebagai berikut :

No	Kriteria Skor	Rentang Skor
1	Terimplementasi	78 - 99
2	Cukup Terimplementasi	56 - 77
3	Kurang Terimplementasi	33 - 55

4. Indikator Disposisi jumlah responden adalah 11 orang dan jumlah pertanyaan yang diajukan 3 pertanyaan. Nilai tertinggi dari jawaban responden adalah $3 \times 11 \times 3 = 99$, sedangkan nilai terendah adalah $1 \times 11 \times 3 = 33$. Dengan demikian interval untuk 3 kategori adalah $(99-33)/3 = 22$. Dari interval diatas dikategorikan skor jawaban responden sebagai berikut :

No	Kriteria Skor	Rentang Skor
1	Terimplementasi	78 - 99
2	Cukup Terimplementasi	56 - 77
3	Kurang Terimplementasi	33 - 55

5. Indikator Struktur Organisasi jumlah responden adalah 11 orang dan jumlah pertanyaan yang diajukan 3 pertanyaan. Nilai tertinggi dari jawaban responden adalah $3 \times 11 \times 3 = 99$, sedangkan nilai terendah adalah $1 \times 11 \times 3 = 33$. Dengan demikian interval untuk 3 kategori adalah $(99-33)/3 = 22$. Dari interval diatas dikategorikan skor jawaban responden sebagai berikut :

No	Kriteria Skor	Rentang Skor
1	Terimplementasi	78 - 99
2	Cukup Terimplementasi	56 - 77
3	Kurang Terimplementasi	33 - 55

B. Dinas PUPR

1. Variabel Implementasi jumlah responden adalah 5 orang dan jumlah pertanyaan yang diajukan 12 pertanyaan. Nilai tertinggi dari jawaban responden adalah $3 \times 5 \times 12 = 180$, sedangkan nilai terendah adalah $1 \times 5 \times 12 = 60$. Dengan demikian interval untuk 3 kategori adalah $(180-60)/3 = 40$. Dari interval diatas dikategorikan skor jawaban responden sebagai berikut :

No	Kriteria Skor	Rentang Skor
1	Terimplementasi	141 – 180
2	Cukup Terimplementasi	101 – 140
3	Kurang Terimplementasi	60 – 100

2. Indikator Komunikasi jumlah responden adalah 5 orang dan jumlah pertanyaan yang diajukan 3 pertanyaan. Nilai tertinggi dari jawaban responden adalah $3 \times 5 \times 3 = 45$, sedangkan nilai terendah adalah $1 \times 5 \times 3 = 15$. Dengan demikian interval untuk 3 kategori adalah $(45-15)/3 = 10$. Dari interval diatas dikategorikan skor jawaban responden sebagai berikut :

No	Kriteria Skor	Rentang Skor
1	Terimplementasi	36 - 45
2	Cukup Terimplementasi	26 – 35
3	Kurang Terimplementasi	15 – 25

3. Indikator Sumber Daya jumlah responden adalah 5 orang dan jumlah pertanyaan yang diajukan 3 pertanyaan. Nilai tertinggi dari jawaban responden adalah $3 \times 5 \times 3 = 45$, sedangkan nilai terendah adalah $1 \times 5 \times 3 = 15$. Dengan demikian interval untuk 3 kategori adalah $(45-15)/3 = 10$. Dari interval diatas dikategorikan skor jawaban responden sebagai berikut :

No	Kriteria Skor	Rentang Skor
1	Terimplementasi	36 - 45
2	Cukup Terimplementasi	26 – 35
3	Kurang Terimplementasi	15 – 25

4. Indikator Disposisi jumlah responden adalah 5 orang dan jumlah pertanyaan yang diajukan 3 pertanyaan. Nilai tertinggi dari jawaban responden adalah $3 \times 5 \times 3 = 45$, sedangkan nilai terendah adalah $1 \times 5 \times 3 = 15$. Dengan demikian interval untuk 3 kategori adalah $(45-15)/3 = 10$. Dari interval diatas dikategorikan skor jawaban responden sebagai berikut :

No	Kriteria Skor	Rentang Skor
1	Terimplementasi	36 - 45
2	Cukup Terimplementasi	26 - 35
3	Kurang Terimplementasi	15 - 25

5. Indikator Struktur Organisasi jumlah responden adalah 5 orang dan jumlah pertanyaan yang diajukan 3 pertanyaan. Nilai tertinggi dari jawaban responden adalah $3 \times 5 \times 3 = 45$, sedangkan nilai terendah adalah $1 \times 5 \times 3 = 15$. Dengan demikian interval untuk 3 kategori adalah $(45-15)/3 = 10$. Dari interval diatas dikategorikan skor jawaban responden sebagai berikut :

No	Kriteria Skor	Rentang Skor
1	Terimplementasi	36 - 45
2	Cukup Terimplementasi	26 - 35
3	Kurang Terimplementasi	15 - 25

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu survey deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Penelitian ini dilakukan dengan menempuh langkah – langkah pengumpulan data, klasifikasi, pengolahan / analisis data, membuat kesimpulan dan menyusun laporan (Notoatmodjo, 2010:36).

Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, yaitu pengukuran data kuantitatif dan statistic objektif melalui perhitungan ilmiah berasal dari sampel orang – orang atau penduduk yang diminta menjawab atas sejumlah pertanyaan tentang survey untuk menentukan frekuensi dan prosentase tanggapan mereka (Cresweel, 2010:24).

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir. Alasan yang mengiring peneliti untuk melakukan penelitian di Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir adalah karena belum optimalnya Kinerja Dinas Perhubungan dalam rencana pembangunan pelabuhan lokal, hal ini dibuktikan dengan belum selesainya pelabuhan yang dibangun dari tahun 2017 sampai sekarang sehingga masyarakat masih menggunakan pelabuhan swasta dengan biaya yang cukup mahal. Dan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 55 Tahun 2016 kewenangan pelabuhan berada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir, sehingga peneliti melakukan penelitian di Dinas Perhubungan ini.

Lokasi penelitian juga dilakukan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir dikarenakan Dinas PUPR sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah membangun infrastruktur dalam hal ini pembangunan pelabuhan yang merupakan sarana transportasi laut, maka dinas perhubungan berkoordinasi dan bekerja sama dengan Dinas PUPR guna membantu pengelolaan teknis kegiatan seperti menunjuk tenaga teknis dinas PUPR untuk membantu dalam Pengawasan dan menunjuk pihak ketiga yang bertugas dalam pembangunan fisik pelabuhan tersebut yaitu pemborong atau kontraktor.

C. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Menurut Arikunto (2013:173) populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Sedangkan menurut Sugiyono (2012:80) mengemukakan bahwa : Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari yang kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan juga benda – benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/ sifat yang dimiliki oleh subyek/obyek itu.

Adapun yang akan dijadikan populasi oleh peneliti adalah 1 orang Kepala Dinas Perhubungan, 1 orang Kepala Dinas PUPR, 1 orang Bagian Perencanaan Program Dinas Perhubungan, 1 orang Bagian Perencanaan dan Program Dinas PUPR, 4 orang bidang cipta karya dan jasa konstruksi di Dinas PUPR Kab. Rokan Hilir dan 10 orang seksi sarana dan prasarana Dinas Perhubungan.

2. Sampel

Sampel menurut Sugiyono (2012;81) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil dari populasi juga harus representative (mewakili). Agar dapat memberikan informasi secara jelas dan lengkap.

Dari sampel untuk penelitian berjumlah 18 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Dinas Perhubungan, 1 orang Kepala Dinas PUPR, 1 orang Bagian Perencanaan dan Program Dinas Perhubungan, 1 orang Bagian Perencanaan dan Program Dinas PUPR dan 4 orang bidang cipta karya dan jasa konstruksi di Dinas PUPR Kab. Rokan Hilir dan 10 orang seksi sarana dan prasarana Dinas Perhubungan.

Tabel III.1. Tabel Populasi dan Sampel

No	Keterangan	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Dinas Perhubungan	1	1	100%
2	Kepala Dinas PUPR	1	1	100%
3	Bagian Perencanaan dan Program Dinas Perhubungan	1	1	100%
4	Bagian Perencanaan dan Program Dinas PUPR	1	1	100%
5	Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi di Dinas PUPR Kab. Rokan Hilir	4	4	100%
6	Seksi sarana dan prasarana Dinas Perhubungan	10	10	100%
	Jumlah	18	18	-

Sumber : Data Olahan Penulis, 2019

D. Teknik Penarikan Sampel

Penulis menetapkan untuk menggunakan teknik penarikan sampel yaitu teknik sensus yaitu cara pengumpulan data apabila seluruh elemen populasi diselidiki satu per satu, teknik ini ditujukan Kepala Dinas Perhubungan, Kasubag

Perencanaan Program, Bagian Perencanaan dan Program dan bidang cipta karya dan jasa konstruksi di Dinas PUPR Kab. Rokan Hilir.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Yaitu data yang penulis peroleh secara langsung dari responden, yang mana data ini terdiri dari identitas responden berisi jenis kelamin, umur, masa kerja responden pada penelitian proses rancang bangun fasilitas pelabuhan pelayaran lokal oleh Dinas Perhubungan di Kabupaten Rokan Hilir.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang penulis peroleh dari kantor yang terdiri dari gambaran umum tentang implementasi rencana pembangunan pelabuhan pengumpul lokal di Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data yang dibutuhkan, maka peneliti akan lebih banyak mencari data sekunder berupa catatan – catatan, laporan – laporan, dokumen – dokumen ataupun literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Selain itu, peneliti juga mencari data primer yang dapat mendukung data sekunder.

Menurut Creswell (2010:124) teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif terdiri atas tiga strategi pengumpulan data, yaitu wawancara kualitatif, observasi kualitatif, dan dokumen – dokumen kualitatif. Sejalan dengan itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Kuisisioner

Kuisisioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara memberi pertanyaan tertulis pada responden. Dalam penelitian ini, responden yang diberikan kuisisioner adalah masyarakat yang menggunakan jasa pelabuhan di Kabupaten Rokan Hilir. Pertanyaan yang diberikan melalui kuisisioner berkaitan langsung dengan indikator variabel penelitian.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab oleh peneliti kepada responden. Teknik ini dilakukan agar informasi yang didapatkan oleh peneliti lebih jelas dan akurat serta mendalam. Dan kemudian, teknik ini juga sangat bermanfaat jika diterapkan pada informan atau orang atau responden yang dianggap banyak tahu tentang apa yang sedang diteliti oleh peneliti.

Dan peneliti melakukan wawancara dengan kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir, Kasubag Perencanaan dan Program serta Pegawai Perencanaan dan Program sebagai sumber informasi. Hal – hal yang diwawancara terkait proses rancang bangun fasilitas pelabuhan pelayaran lokal oleh dinas perhubungan di kabupaten Rokan Hilir.

3. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi terhadap objek penelitian yaitu Implementasi Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal Dinas Perhubungan Oleh Dinas PUPR Kabupaten Rokan Hilir .

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan fasilitas untuk mengabadikan sebuah momen. Baik foto, rekaman, dan lain – lain. Namun tidak bisa semua yang berkaitan dengan indikator variabel bisa di dokumentasi.

G. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditentukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang digunakan (Moleong, 2012:103).

Selanjutnya dilakukan teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan peneliti bertujuan untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan dari segala segi. Adapun teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan triangulasi. Menurut Moleong (2012:331) Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang dimanfaatkan sesuatu yang lain.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Jadwal kegiatan penelitian tentang Implementasi Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal Dinas Perhubungan Oleh Dinas PUPR Kabupaten Rokan Hilir dimulai pada Maret 2020 sampai dengan Agustus 2020 seperti rincian penggunaan waktu perkegiatan yang tertera pada tabel berikut :

Tabel III.2 : Tabel Jadwal Kegiatan Penelitian tentang Implementasi Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal Dinas Perhubungan Oleh Dinas PUPR Kabupaten Rokan Hilir.

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Ke																							
		Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP																								
2	Seminar UP																								
3	Revisi UP																								
4	Revisi Kuisisioner																								
5	Rekomendasi Survey																								
6	Survay Lapangan																								
7	Analisis Data																								
8	Penyusunan laporan hasil penelitian (Skripsi)																								
9	Konsultasi Revisi Skripsi																								
10	Ujian Konferehensif Skripsi																								
11	Revisi Skripsi																								
12	Penggandaan Skripsi																								

Sumber : Modifikasi Penulis, 2020

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hilir

4.1.1 Sejarah Kabupaten Rokan Hilir

Kabupaten Rokan Hilir adalah sebuah kabupaten di Provinsi Riau Indonesia. Ibu kotanya terletak di Bagansiapiapi, kota bersejarah, dan pernah dikenal sebagai penghasil ikan terbesar di Indonesia. Kabupaten ini sebelumnya termasuk ke dalam Kabupaten Bengkalis. Pusat pemerintahan kabupaten berada di tengah-tengah kota Bagansiapiapi, tepatnya di Jalan Merdeka. Kabupaten Rokan Hilir merupakan sebuah Kabupaten baru yang merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Kabupaten Rokan Hilir terletak di pesisir timur Pulau Sumatera pada koordinat 1014' sampai 2030' LU dan 100016' hingga 101021' BT dan berhadapan dengan Selat Melaka. Luas wilayah Kabupaten Rokan Hilir adalah 8.881,59 Km² dan penduduk sejumlah 349.771 jiwa.

Rokan Hilir dibentuk dari tiga kenegerian, yaitu negeri Kubu, Bangko dan Tanah Putih. Negeri-negeri tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Negeri yang bertanggung jawab kepada Sultan Siak. Distrik pertama didirikan Hindia Belanda di Tanah Putih pada saat menduduki daerah ini pada tahun 1890. Setelah Bagansiapiapi yang dibuka oleh pemukim-pemukim Tionghoa berkembang pesat, Belanda memindahkan pemerintahan kontrolir-nya ke kota ini pada tahun 1901. Bagansiapiapi semakin berkembang setelah Belanda membangun pelabuhan modern dan terlengkap untuk mengimbangi pelabuhan lainnya di Selat Malaka hingga Perang Dunia I usai. Setelah kemerdekaan Indonesia, Rokan Hilir

digabungkan ke dalam Kabupaten Bengkalis. Provinsi Riau. Bekas wilayah Kewedanaan Bagansiapiapi yang terdiri dari Kecamatan Tanah Putih, Kubu dan Bangko serta Kecamatan Rimba Melintang dan Kecamatan Bagan Sinembah kemudian pada tanggal 4 Oktober 1999 ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai kabupaten baru di Provinsi Riau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 dengan ibukota Bagansiapiapi.

Secara Administratif Kabupaten Rokan Hilir telah mengalami beberapa kali pemekaran wilayah sejak terbentuknya pada tahun 1999 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten induknya Bengkalis sesuai dengan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam. Pada awal berdirinya Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari 6 (enam) Kecamatan yaitu kecamatan Bangko, Kecamatan Tanah Putih, Kecamatan Bagan Sinembah, Kecamatan Simpang Kanan, Kecamatan Rimba Melintang dan Kecamatan Kubu. Seiring dengan bertambahnya waktu dan pertumbuhan penduduk maka dilakukan beberapa kali pemekaran.

Pemekaran pertama di mulai pada Tahun 2002 sesuai perda No 23 Tahun 2002 dilakukan pemekaran kecamatan Bangko menjadi 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Sinaboi dan Pasir Limau Kapas. Kemudian Kecamatan Pujud merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Tanah Putih, Kecamatan simpang kanan hasil pemekaran Kecamatan Bagan Sinembah. Masih pada tahun yang sama berdasarkan Perda 24 Tahun 2002 kecamatan di Rokan Hilir bertambah 2

(dua) kecamatan yaitu kecamatan Tanah Putih tanjung Melawan pemekaran dari kecamatan Tanah Putih dan Kecamatan Bangko Pusako pemekaran Kecamatan Simpang Kanan.

Selanjutnya pada Tahun 2004 sesuai perda Nomor 03 Tahun 2004, terjadi pemekaran Kecamatan Batu Hampar dari Kecamatan Rimba Melintang. Pada Tahun 2005 berdasarkan perda Nomor 01 Tahun 2005, pemerintah kabupaten Rokan Hilir berhasil melakukan pemekaran kecamatan baru yaitu Kecamatan Rantau Kopar yang merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Pasir Limau Kapas. Tahun 2010 perda Nomor 02 Tahun 2010 dibentuk Kecamatan Pekaitan yang merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Bangko. Pada Tahun 2011 berdasarkan perda Nomor 27 Tahun 2011 pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melakukan pemekaran Kecamatan Kubu yaitu Kecamatan Kubu Babussalam. Setelah lebih kurang 14 (empat belas) tahun Kabupaten Rokan Hilir berdiri, pemerintah Kabupaten Rokan Hilir telah menjadi 18 (delapan belas) kecamatan dan 83 desa. 18 (delapan belas) kecamatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Bangko
2. Kecamatan Sinaboi
3. Kecamatan Rimba Melintang
4. Kecamatan Bangko Pusako
5. Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan
6. Kecamatan Tanah Putih
7. Kecamatan Kubu
8. Kecamatan Bagan sinembah
9. Kecamatan Pujud
10. Kecamatan Simpang Kanan
11. Kecamatan Pasir Limau Kapas
12. Kecamatan Batu Hampar
13. Kecamatan Rantau Kopar
14. Kecamatan Pekaitan
15. Kecamatan Kubu Babussalam

16. Kecamatan Bagan Sinembah Raya
17. Kecamatan Balai Jaya
18. Kecamatan Tanjung Medan

4.1.2. Letak Geografis, Letah Wilayah dan Luas

Kabupaten Rokan Hilir terletak pada bagian pesisir timur Pulau Sumatera, dengan luas wilayah 8. 881,59 KM² atau 888.159 ha, terletak pada kordinat 101'21 BT, terdiri dari pulau-pulau dan lautan. Batas Kabupaten Rokan Hilir yaitu sebagai berikut:

1. Sebelah Utara dengan Selat Malaka.
2. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis.
3. Sebelah Barat dengan Provinsi Sumatera Utara
4. Sebelah Timur dengan Kota Dumai

Wilayah Rokan Hilir dialiri beberapa sungai. Berdasarkan data yang ada di daerah ini terdapat 16 batang jalur sungai. Sungai-sungai yang ada di kabupaten ini umumnya menjadi sarana lalu lintas, dapat dilayari perahu, perahu motor (pomong) kapalotor. Penelusuran aliran sungai ini dapat dilayari sampai ke hulu sungai Rokan. Adapun sungai-sungai tersebut adalah; Sungai Rokan, Sungai Daun, Sungai Agas, Sungai Bangko, dan sebagainya. Dari sekian banyak sungai tersebut yang paling penting sebagai sarana perhubungan adalah Sungai Rokan, yang panjangnya sekitar 350 KM.

Kondisi wilayah Kabupaten Rokan Hilir terdiri beberapa sungai dan palau. Sungai Rokan merupakan sungai terbesar yang melintas sejauh 350 km dari muaranya di Rokan Hilir hingga ke Hulunya di Rokan Hulu. Sebagai sungai terbesar, Sungai Rokan memainkan peranan penting sebagai lalu lintas penduduk dan sumber ekonomi masyarakat. Sungai-sungai lainnya adalah Sungai Kubu,

Sungai Daun, Sungai Bangko, Sungai Sinaboi, Sungai Mesjid, Sungai Siakap, Sungai Ular dan Lainnya. Sebagian besar wilayah Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari dataran rendah dan rawa-rawa, terutama di sepanjang Sungai Rokan hingga ke Muaranya. Wilayah ini memiliki tanah yang sangat subur dan menjadi lahan persawahan padi terkemuka di Provinsi Riau.

Kondisi wilayah Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari beberapa sungai dan pulau. Kabupaten Rokan Hilir memiliki 16 sungai yang dapat dilayari oleh pompong, sampan dan perahu. Sungai Rokan merupakan sungai terbesar sebagai sarana perhubungan utama dalam perekonomian masyarakat yang melintas sejauh 350 km² dari muaranya di Rokan Hilir hingga ke hulunya di Rokan Hulu.

Berikut ini adalah nama-nama pulau yang ada di Kabupaten Rokan Hilir:

1. Pulau Halang: Kecamatan Kubu
2. Pulau Jemur: Kecamatan Pasir Limau Kapas
3. Pulau Berkey: Kecamatan Bangko
4. Pulau Pedamaran: Kecamatan Pekaitan
5. Pulau Sinaboi: Kecamatan Sinaboi.

Topografi Kabupaten Rokan Hilir ini terdiri dari daerah datar dan rendah dan sebagian lagi dataran tinggi. Daerah yang datarannya rendah adalah sebelah utara, daerah ini terdiri dari rawa-rawa dan merupakan daerah dataran tinggi. Kemudian daerah Kabupaten Rokan Hilir, selain mempunyai daerah datar juga terdiri dari daerah pesisir dan pulau. Pulau-pulau yang ada di Kabupaten Rokan Hilir menyebar di beberapa kecamatan yaitu; Kecamatan Kubu terdapat Pulau Halang, Pulau Jemur di Pasir Limau Kapas, Pulau Berkey, Pulau Pedamaran di Kecamatan Bangko, dan Pulau Sinaboi di Kecamatan Sinaboi.

Sebagian besar wilayah Rokan Hilir terdiri dari dataran rendah dan rawa-rawa, terutama di sepanjang Sungai Rokan hingga ke muaranya. Wilayah ini memiliki tanah yang sangat subur dan menjadi lahan persawahan padi terkemuka di Propinsi Riau.

Kabupaten Rokan Hilir dipengaruhi oleh keberadaan 16 (enam belas) aliran sungai. Sungai Rokan merupakan sungai utama dengan panjang 350 km dan kedalaman 6 – 18 m yang melintasi kecamatan Bangko, Rimba Melintang, dan Tanah Putih. Sungai Rokan berasal dari dua cabang anak sungai yaitu sungai Rokan kanan dan sungai rokan kiri yang hulu anak sungainya di pengunungan bukit barisan pada bagian timur Kabupaten Tapanuli Selatan dan pada bagian barat Kabupaten Rokan Hulu.

Berdasarkan luas dan panjang sungai di Kabupaten Rokan Hilir, Sungai Rokan Merupakan sungai terpanjang dan mempunyai peranan yang penting bagi masyarakat. Yaitu Sebagai Prasarana transportasi sungai, pengairan lahan, sumber air bersih dan memiliki sumber daya perikanan. Adapun secara rinci pemanfaatan Sungai Rokan sebagai berikut:

1. Dalam kaitannya dengan sumber air bersih, pemanfaatan Sungai Rokan selain untuk keperluan air bersih di Kabupaten Rokan Hilir, juga dimanfaatkan oleh kota Dumai untuk memenuhi kebutuhan airnya. Oleh karenanya di indikasikan bahwa keberadaan sungai ini dapat menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah melalui perjanjian melalui perjanjian pemanfaatan dengan kota Dumai maupun wilayah lainnya yang memerlukan pasokan air;

2. Sungai Rokan keadaannya dipengaruhi oleh pasang surut air laut, maka daerah-daerah rawa tepi sungai ini sangat baik untuk dikembangkan sebagai daerah persawahan pasang surut;
3. Sungai Rokan memiliki potensi sumberdaya ikan, baik berupa penangkapan maupun budidaya perikanan darat. Seperti : aliran sungai Rokan yang terdapat di kecamatan Tanah Putih, merupakan sumber daya Ikan bagi masyarakat setempat. Hasil tangkapan utama yang diperoleh yaitu udang gantung, udang galah, ikan balido dan ikan toman.

Untuk lebih jelasnya sebaran sungai yang terdapat di Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 4.1. Nama-nama Sungai dalam Kabupaten Rokan Hilir Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Nama Sungai
1.	Tanah Putih	Sungai Rokan
2.	Kubu	Sungai Rokan
		Sungai Ular
		Sungai Tengah
		Sungai Siandun
		Sungai Agas
		Sungai Subang
		Sungai Lilin
3.	Pasir Limau Kapas	Sungai Daun
4.	Bangko	Sungai Serusa
		Sungai Rokan
5.	Sinaboi	Sungai Raja Bejamu

		Sungai Sinaboi
		Sungai Bakau
6.	Rimba Melintang	Sungai Rokan
7.	Bangko Pusako	Sungai Bangko

Sumber: Kabupaten Rokan Hilir Dalam Angka Tahun 2017.

4.1.3. Visi dan Misi Kabupaten Rokan Hilir

Visi Pembangunan Kabupaten Rokan Hilir adalah:

"Terwujudnya Rokan Hilir sebagai Kawasan Industri guna menuju Masyarakat Madani dan Mandiri yang Sejahtera".

Visi tersebut menggambarkan harapan atau keinginan mewujudkan kehidupan masyarakat yang Madani, Mandiri dan Sejahtera dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Masyarakat Madani adalah masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani dan memaknai kehidupannya. Masyarakat yang Madani adalah masyarakat yang demokratis, menjunjung tinggi etika dan moralitas, transparan, toleransi, berpotensi, aspiratif, bermotivasi, sederhana dan konsisten;
2. Kemandirian Daerah adalah kemampuan riil atau nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/ rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh-sungguh agar secara bertahap bisa mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain (luar) tanpa kehilangan adanya kerjasama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan;
3. Masyarakat Sejahtera adalah terpenuhinya keinginan dan harapan hidup yang lebih baik yaitu kemampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang dan papan), kemudahan memperoleh akses terhadap kebutuhan hidup dasar (kesehatan, pendidikan, sanitasi air bersih dan transportasi), adanya jaminan masa depan (investasi untuk pendidikan dan keluarga), peningkatan

kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam bagi masyarakat;

4. Kemajuan-kemajuan yang ingin diraih dimaksud tidak hanya sekedar kemajuan dibidang fisik dan ekonomi saja, akan tetapi kita akan berusaha berupaya kerja keras pula untuk dapat meraih kemajuan-kemajuan pada dimensi mental-spiritual, keagamaan, kebudayaan dan non fisik, agar kehidupan masyarakat benar-benar sejahtera lahir dan bathin.

Sedangkan Misi Pembangunan Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut:

1. Membangun masyarakat Rokan Hilir yang berbudaya melayu, berakhlak, beriman dan bertaqwa;
2. Mengembangkan industri hulu dan hilir sebagai alternatif pengganti sumber pendapatan daerah yang selama ini bersumber dari migas sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat;
3. Mengembangkan Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan derajat kesehatan dan derajat pendidikan individu dan masyarakat;
4. Mengedepankan prinsip good governance untuk pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan iklim investasi;
5. Mengembangkan perekonomian yang bertumpu pada perluasan pembangunan infrastruktur pedesaan dan perkotaan untuk pengembangan pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan dan kemandirian masyarakat.

4.1.4. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk

Jumlah Penduduk Secara administratif, Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari 18 Kecamatan yang terbentang sedemikian luasnya. Penduduk yang jarang dan tersebar tidak merata menyebabkan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat di beberapa tempat sulit dijangkau. Menurut data terbaru dari BPS Kabupaten Rokan Hilir, jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017 adalah

580.262 jiwa. Dimana kelompok umur terbanyak terdapat pada kelompok umur produktif yaitu kelompok umur 15 – 44 tahun sebanyak 272.496 jiwa atau sekitar 49,39 % dari keseluruhan penduduk Kabupaten Rokan Hilir yang ada (Data tahun 2017).

Sedangkan Kepadatan penduduk Kabupaten Rokan Hilir tahun 2016 yaitu 65,33 orang per Km² meningkat dibandingkan tahun 2017 (62,12 orang per Km²). Kecamatan Bagan Sinembah memiliki kepadatan penduduk tertinggi sebesar 160,67 orang per Km². Rata-rata jiwa per rumah tangga pada tahun 2017 di Kabupaten Rokan Hilir adalah 4,33(4 s/d 5 jiwa per rumah tangga). Rata-rata jiwa/rumah tangga tertinggi sebesar 4.63 yaitu di Bangko dan Kecamatan Pasir Limau Kapas dan terendah adalah Kecamatan Pekaitan (4,10 jiwa/rumah tangga).

4.1.5. Pemerintahan

Kabupaten Rokan Hilir sebagai daerah kabupaten yang baru, secara administrasi telah menyusun organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007. Organisasi perangkat daerah dibentuk sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten yang bersangkutan. Pasal 1 (satu) ayat 8 (delapan) perangkat daerah kabupaten/kota adalah unsur pembantu Kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari: 1) Sekretariat Daerah 2) Dinas Daerah dan Lembaga Teknis daerah. Kecamatan dan Kelurahan, kemudian ayat 9 (Sembilan) dimasukkan sebagai perangkat daerah untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Pembentukan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dikukuhkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999.

Kabupaten Rokan Hillir secara administrasi dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati. Untuk membantu kinerja Bupati dan Wakil Bupati dibantu oleh Staf Ahli dan Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, Dinas dan Lembaga Teknis sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah:

- 1) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;
- 2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan Dan Tugas Pokok Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;
- 3) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan Dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

4.2. Dinas Pemukiman Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir

1. Dasar Hukum Pembentukan

Dengan berlakunya Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir telah melakukan reorganisasi perangkat daerah yang telah diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir No. 10 tahun 2007 tentang

pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Kabupaten Rokan Hilir. Peraturan Daerah tersebut ditinjau lanjuti dengan Keputusan Bupati Rokan Hilir melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir No. 50 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir.

Berdasarkan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir adalah unsur Pelaksanaan Pemerintah Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana di Bidang ke PU an yang dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas.

2. Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

Tugas Pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 50 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir adalah :

“MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR DIBIDANG KE PU AN ”

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir melaksanakan fungsi :

1. Penyusunan rancangan dokumen – dokumen perencanaan RPJPD , RPJMD DAN RKPD ;
 2. Perumusan Kebijakan teknis di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir ;
 3. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir ;
 4. Pelaksanaan tugas bidang Pekerjaan Umum ;
 5. Penyelenggaraan pelaksanaan penanganan darurat akibat bencana alam ;
 6. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Sumber Daya Air , Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang ;
 7. Pengorganisasian pelaksanaan Bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang;
 8. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.
3. Sumber Daya Manusia
- Sumber daya manusia merupakan faktor penentu keberhasilan yang dibutuhkan dalam menjalankan organisasi. Jumlah pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir adalah 83 orang Pegawai Negeri Sipil dengan Komposisi 17 orang pejabat struktural dan 66 orang sebagai staf pelaksana.
4. Visi dan Misi Dinas PUPR
- a. Visi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan kemana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir akan diarahkan dan apa yang ingin dicapai. Dalam mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir Secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*).

Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir telah ditetapkan dengan pertimbangan nilai-nilai sebagai berikut :

1. Keterpaduan
2. Menghargai prestasi, kreasi dan inovasi
3. Dinamis
4. Keselarasan, Kerasasian dan Keseimbangan
5. Menghargai kebersamaan dan rasa persaudaraan
6. Menjunjung tinggi etika dan Kejujuran
7. Mengutamakan keterbukaan dan rasa saling mempercayai
8. Memandang Realita sebagai evaluasi kerja.

Perubahan Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir tetap mengacu pada visi pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dengan tetap memperhitungkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir, adapun Visi Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang adalah sebagai berikut : “TERWUJUDNYA HASIL PEKERJAAN UMUM YANG REPRESENTATIF UNTUK MEWUJUDKAN KAWASAN ANDALAN PEREKONOMIAN YANG BERBASIS KERAKYATAN”.

b. Misi

Pernyataan misi mengandung makna yang mencerminkan pandangan organisasi tentang kemampuan dirinya. Pernyataan misi merupakan hal yang sangat penting untuk mengarahkan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir untuk lebih eksis dan dapat mengikuti efek global otonomi daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir menetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan system dan fungsi prsarana jalan untuk kelancaran perekonomian dan membuka hubungna antar daerah.
2. Meningkatkan pengelolaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat serta menyiapkan jaringan irigasi untuk meningkatkan ketahanan pangan.
3. Meningkatkan Akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

4.3. Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir

Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan sebagian urusan pemerintah dibidang perhubungan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggung Jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perhubungan sebagai unsur teknis pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Rokan Hilir yang melaksanakan kewenangan di bidang Perhubungan, serta tugas desentralisasi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah serta peraturan daerah nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Adapun Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Sekretariat
 1. Sub Bagian Ketatausahaan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan program
- c. Bidang Perhubungan Darat, membawahi :
 1. Seksi Manajemen Lalu Lintas
 2. Seksi Sarana dan Prasarana
 3. Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana Angkutan Darat
- d. Bidang Perhubungan Laut dan Udara, membawahi :
 1. Seksi Lalu lintas Angkutan Laut
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut
 3. Seksi Perhubungan Udara
- e. Unit Pelaksana Teknis
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir

Guna memadukan, mengarahkan menggerakkan serta memberikan kekuatan, semangat dan komitmen dalam menjalankan roda organisasi maka perlu ditetapkan suatu Visi. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang.

Visi merupakan suatu pernyataan yang merupakan ungkapan atau artikulasi dari citra, nilai arah dan tujuan organisasi yang realistis, memberikan kekuatan, semangat dan komitmen serta memiliki daya tarik yang dapat dipercaya sebagai pemandu dalam pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan organisasi.

Penetapan Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir tentunya mengacu kepada apa yang dicita-citakan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Rokan Hilir.

Penetapan visi Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir merupakan upaya untuk memadukan gerak langkah setiap unsur organisasi dan masyarakat untuk mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya yang ada, untuk menjadi kan Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Adapun Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal dan Terpadu Tahun 2021”. Adapun penjelasan makna dari Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan transportasi yang handal

Pelayanan transportasi yang handal diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang aman (*security*), selamat (*safety*), nyaman (*comfortable*), tepat waktu (*punctuality*), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Rokan Hilir.

2. Pelayanan transportasi yang terpadu

Mempunyai pengertian bahwa tatanan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman, terdiri dari transportasi jalan, transportasi sungai dan laut yang masing – masing terdiri sarana dan prasarana yang saling berinteraksi membentuk system pelayanan jasa transportasi yang efektif, efisien, terpadu dan harmonis, berkembang secara dinamis.

3. Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir

Setelah menentukan visi yang menjadi dasar untuk mencapai tujuan yang diinginkan, Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir harus menyusun Misi atau mandate atau sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

Dengan melihat dan memperhatikan permasalahan umum dan tugas fungsi dinas perhubungan Kabupaten Rokan Hilir serta aspirasi dan masukan yang diterima, maka ditetapkanlah Misi dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir selama lima tahun ke depan sebagaimana berikut :

1. Meningkatkan pelayanan transportasi yang tertib, aman dan lancar.

Misi ini ditetapkan dalam upaya untuk meningkatkan akseibilitas dan pelayanan transportasi di kawasan pedesaan, kawasan pesisir dan pulau teluar perbatasan Negara yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan

pemerintah daerah, selain itu guna memperlancar mobilitas manusia diperlukan upaya mengurangi / menurunkan tingkat kecelakaan dan pelanggaran norma, standar, prosedur di sector di sector transportasi. Pemerintah Kabupaten terus berupaya secara bertahap membenahi system keselamatan dan keamaan transportasi menuju kondisi zero to accident. Upaya yang dilakukan pemerintah tidak saja bertumpu kepada penyediaan fasilitas keselamatan namun juga melalui pemeliharaan fasilitas keselamatan yang ada sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

2. Meningkatkan kemampuan kelembagaan dan SDM aparatur.

Misi ini ditetapkan dalam upaya untuk mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif, menciptakan professionalism birokrasi serta sumber daya Aparatur yang professional, handal, dan memiliki wawasan pengetahuan, keterampilan, moral dan disiplin dalam melaksanakan tugas – tugas kedinasan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Gambaran Subjek Penelitian

Populasi pada penelitian ini adalah Dinas Perhubungan dan Dinas PUPR Kabupaten Rokan Hilir. Dengan penyebaran kuisisioner sebanyak 18 responden dengan menggunakan teknik sampling jenuh (sensus) dimana keseluruhan populasi dijadikan sampel. Karakteristik penelitian terdiri dari :

1. Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin

Tabel V.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki – laki	15	83
2	Perempuan	3	17
		18	100

Sumber : Kuisisioner (identitas responden)

Berdasarkan tabel V.1 diketahui bahwa mayoritas responden penelitian adalah didominasi oleh responden yang berjenis kelamin laki – laki yakni sebanyak 15 orang atau sebesar 83 persen. Sementara responden yang berjenis kelamin perempuan hanya berjumlah 3 orang atau sebesar 17 persen.

2. Karakteristik Responden Menurut Umur

Tabel V.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Umur	Jumlah	Persentase (%)
1	≤ 30	5	28
2	31 – 40	4	22
3	41 – 50	3	17
4	≥ 50	6	33
	Jumlah	18	100

Sumber : Kuisisioner (identitas responden)

Berdasarkan tabel V.2 diatas, diketahui bahwa mayoritas responden penelitian didominasi oleh responden yang berusia diatas 50 tahun dengan jumlah

6 orang atau sebanyak 33 persen. Urutan kedua ditempati oleh responden dengan usia dibawah 30 tahun dengan jumlah 5 orang atau sebanyak 28 persen. Urutan ketiga ditempati oleh responden dengan usia antara 31-40 tahun yang berjumlah 4 orang atau 22 persen, sedangkan usia 41- 50 tahun berjumlah 3 orang atau sebesar 17 persen. Kondisi ini menunjukkan pejabat yang bekerja pada dinas perhubungan dan dinas PUPR berada pada usia produktif sehingga dapat dengan mudah menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepadanya.

3. Karakteristik Responden Menurut Tingkat Pendidikan

Tabel V.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	SMA sederajat	4	22
2	D3	5	28
3	S1	5	28
4	S2	4	22
	Jumlah	18	100

Sumber : Kuisisioner (Identitas Responden)

Berdasarkan tabel V.3 diatas, diketahui bahwa mayoritas responden penelitian didominasi oleh responden yang memiliki pendidikan D3 dan S1 yakni sebanyak 5 orang atau sebesar 28 persen. Kemudian ditempati oleh responden dengan latar belakang pendidikan SMA sederajat dan S2 yang berjumlah 4 orang dengan persentase 22 persen. Dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa yang rata – rata pegawai yang bekerja di Dinas Perhubungan dan Dinas PUPR memiliki latar belakang pendidikan yang memadai, sehingga mudah mendapatkan informasi mengenai implementasi pembangunan pelabuhan pengumpan lokal Dinas Perhubungan oleh Dinas PUPR Kabupaten Rokan Hilir.

5.2. Hasil Penelitian Implementasi Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal Dinas Perhubungan Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir

Pelabuhan dalam aktivitasnya mempunyai peran penting dan strategis untuk mendorong/ mobilisasi sosial dan ukuran pertumbuhan industri dan perdagangan serta merupakan segmen usaha yang dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional maupun daerah. Hal ini membawa konsekuensi terhadap pengelolaan segmen usaha pelabuhan tersebut agar pengoperasiannya dapat dilakukan secara efektif, efisien dan professional sehingga pelayanan pelabuhan menjadi lancar, aman, dan cepat dengan biaya yang terjangkau.

Pembangunan kawasan pelabuhan harus efisien. Suatu pelabuhan yang efisien merupakan prasyarat bagi perkembangan ekonomi dari suatu kawasan. Karena dengan adanya pelabuhan yang efisien berarti komponen biaya transportasi pengiriman barang dari dan ke kawasan dapat ditekan, yang pada gilirannya akan menyebabkan hasil produksi kawasan menjadi kompetitif di pasar internasional.

Di dalam pelaksanaan pembangunan pelabuhan, Dinas Perhubungan melakukan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam bidang pengelolaan teknis kegiatan pembangunan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang bekerjasama dalam teknis kegiatan pembangunan, sehingga Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang mempunyai tugas, dalam hal membantu pengelolaan teknis kegiatan seperti menunjuk tenaga teknis Dinas PUPR untuk membantu dalam pengawasan dan

evaluasi. Sedangkan untuk pembangunan fisik dilakukan oleh pihak ketiga yaitu kontraktor / pemborong.

Namun pada kenyataannya pembangunan fisik yang sudah direncanakan dalam perencanaan pembangunan pelabuhan pengumpan lokal di Kabupaten Rokan Hilir tidak terlaksana dengan baik, di lihat dari tidak terlaksananya pembangunan pelabuhan sinaboi dimana tipe pelabuhan tambatan perahu 2019 dan pelabuhan sungai pinang dengan tipe pelabuhan tambata perahu 2019. Hal ini menyebabkan sulitnya akses masyarakat dalam penggunaan jasa penyebrangan yang seharusnya masyarakat gunakan untuk menyebrangi antar pulau, maupun transportasi barang, sehingga dapat dipertanyakan apa faktor ari tidak terlaksananya pembangunan pelabuhan di dinas perhubungan yang dibantu oleh dinas PUPR.

Untuk lebih lanjut mengenai tanggapan responden mengenai implementasi pembangunan pelabuhan pengumpan lokal Dinas Perhubungan oleh Dinas PUPR

1) Komunikasi

Komunikasi memegang peranan penting dalam proses kebijakan, yaitu transmisi, konsistensi dan kejelasan (clarity). Persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah itu dapat diikuti. Komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat,

jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi inipun cenderung tidak efektif.

Hasil olahan data penelitian yang peneliti lakukan pada Dinas Perhubungan dalam pembangunan pelabuhan pengumpan lokal, maka didapat tanggapan responden atau jawaban responden terhadap indikator Komunikasi.

Tabel V.4Tanggapan responden Dinas Perhubungan dalam indikator Komunikasi

No	Pertanyaan	Skala Pengukuran			Jumlah	Skor
		T	CT	KT		
1	Informasi kebijakan	7	4	0	11	29
2	Kejelasan	7	4	0	11	29
3	Koordinasi	10	1	0	11	32
Total tanggapan		72	18	0		90
Rentang Skor						78-99
Kategori						Terimplementasi

Sumber : Data olahan hasil penelitian, 2020

Dari tabel diatas, dapat diketahui tanggapan responden pada item informasi kebijakan, adapun responden yang menjawab terimplementasi berjumlah 7 orang ($7 \times 3 = 21$), yang menjawab cukup terimplementasi berjumlah 4 orang ($4 \times 2 = 8$), jadi skor yang diperoleh pada item informasi kebijakan adalah $21 + 8 = 29$. Untuk item penilaian kedua yaitu kejelasan informasi responden yang menjawab terimplementasi berjumlah 7 orang ($7 \times 3 = 21$), yang menjawab cukup terimplementasi berjumlah 4 orang ($4 \times 2 = 8$), jadi skor yang diperoleh pada item kejelasan informasi adalah $21 + 8 = 29$. Sedangkan untuk item penilaian ketiga yaitu koordinasi responden yang menjawab terimplementasi berjumlah 10 orang

(10x3=30), yang menjawab cukup terimplementasi berjumlah 1 orang (1x2=2), jadi skor yang diperoleh pada item informasi kebijakan adalah 30+2=32.

Jadi, dari 3 (tiga) item pertanyaan yang peneliti ajukan kepada 11 orang responden maka didapat 90 total jawaban tentang komunikasi, sebanyak 72 total tanggapan responden berada pada skala terimplementasi, sebanyak 18 total tanggapan responden pada skala Cukup terimplementasi. Berdasarkan tanggapan responden Dinas Perhubungan dapat disimpulkan bahwa indikator komunikasi berada pada kategori terimplementasi. Keadaan ini menunjukkan bahwa dalam implementasi pembangunan pelabuhan pengumpan lokal dinas perhubungan oleh dinas PUPR di Kabupaten Rokan Hilir dari segi komunikasi, pemberian informasi kebijakan, koordinasi kebijakan dan koordinasi yang dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan pelabuhan pengumpan lokal sudah terlaksana sesuai dengan yang telah ditetapkan. Sedangkan tanggapan responden Dinas PUPR dalam pembangunan pelabuhan pengumpan lokal, maka didapat tanggapan responden atau jawaban responden terhadap indikator Komunikasi.

Tabel V.5 Tanggapan responden Dinas PUPR dalam indikator Komunikasi

No	Pertanyaan	Skala Pengukuran			Jumlah	Skor
		T	CT	KT		
1	Informasi kebijakan	0	3	2	5	8
2	Kejelasan	0	4	1	5	9
3	Koordinasi	0	3	2	5	8
Total tanggapan		0	20	5		25
Rentang Skor						15-25
Kategori						Kurang Terimplementasi

Sumber : Data olahan hasil penelitian, 2020

Dari tabel diatas, dapat diketahui tanggapan responden pada item informasi kebijakan, adapun responden yang menjawab cukup terimplementasi berjumlah 3 orang ($3 \times 2 = 6$), yang menjawab kurang terimplementasi berjumlah 2 orang ($2 \times 1 = 2$), jadi skor yang diperoleh pada item informasi kebijakan adalah $6 + 2 = 8$. Untuk item penilaian kedua yaitu kejelasan informasi responden yang menjawab cukup terimplementasi berjumlah 4 orang ($4 \times 2 = 8$), yang menjawab kurang terimplementasi berjumlah 1 orang ($1 \times 1 = 1$), jadi skor yang diperoleh pada item kejelasan informasi adalah $8 + 1 = 9$. Sedangkan untuk item penilaian ketiga yaitu koordinasi responden yang menjawab cukup terimplementasi berjumlah 3 orang ($3 \times 2 = 6$), yang menjawab kurang terimplementasi berjumlah 2 orang ($2 \times 1 = 2$), jadi skor yang diperoleh pada item informasi kebijakan adalah $6 + 2 = 8$.

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari 3 (tiga) item pertanyaan yang peneliti ajukan kepada 5 orang responden maka didapat 25 total jawaban tentang komunikasi, sebanyak 20 total tanggapan responden berada pada skala cukup terimplementasi, dan 5 total tanggapan responden pada skala Kurang terimplementasi. Berdasarkan tanggapan responden pada indikator komunikasi berada pada kategori kurang terimplementasi. Keadaan ini menunjukkan bahwa dalam implementasi pembangunan pelabuhan pengumpan lokal pada indikator komunikasi menurut responden Dinas PUPR belum terlaksana dengan baik, dikarenakan sebagian besar pegawai Dinas PUPR tidak mengetahui pembangunan pelabuhan tersebut serta tidak ada kebijakan yang mengatur tentang pembangunan pelabuhan di Kabupaten Rokan Hilir.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir mengenai indikator Komunikasi menyatakan :

“Pembangunan pelabuhan merupakan salah satu tugas pokok Dinas Perhubungan yang melaksanakan pelaksanaan pembangunan pelabuhan serta sarana dan prasarana pelabuhan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir serta juga berkoodinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai bidang pengelolaan teknis kegiatan pembangunan ”.

Hal ini diperkuat dengan tanggapan kepala Dinas PUPR Kabupaten Rokan Hilir yang menyatakan bahwa :

“Pembangunan pelabuhan sudah direncanakan oleh Dinas Perhubungan sebagai sarana utama transportasi laut, namun dalam pelaksanaannya belum terealisasi sampai sekarang, dikarenakan belum adanya pagu anggaran yang diperuntukkan untuk pembangunan pelabuhan tersebut.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Dinas PUPR diketahui bahwa Dinas Perhubungan hanya sebagai perencana dalam pelaksanaan pembangunan pelabuhan sedangkan yang bertugas secara teknis dalam pembangunan pelabuhan merupakan tugas dari Dinas PUPR dan kedua dinas tersebut saling berkoodinasi satu sama lainnya.

Hasil wawancara sesuai dengan observasi penulis dilapangan bahwa sampai saat ini pembangunan pelabuhan belum terlaksana, masyarakat sampai saat ini masih menggunakan pelabuhan swasta milik masyarakat, sehingga masyarakat masih mengeluarkan biaya yang lumayan besar untuk menggunakan fasilitas pelabuhan tersebut. Sedangkan pelabuhan merupakan elemen penting sebagai sarana perhubungan laut yang menghubungkan dengan pulau – pulau lainnya.

2) Sumber Daya

Sumber – Sumber dapat merupakan faktor yang penting, meliputi staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, keefektifan wewenang, dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

Hasil olahan data penelitian yang peneliti lakukan pada Dinas Perhubungan dalam pembangunan pelabuhan pengumpan lokal, maka didapat tanggapan responden atau jawaban responden terhadap indikator Sumber Daya.

Tabel V.6 Tanggapan responden Dinas Perhubungan dalam indikator Sumber Daya

No	Pertanyaan	Skala Pengukuran			Jumlah	Skor
		T	CT	KT		
1	Sumber Daya Manusia	0	2	9	11	13
2	Sumber Daya Biaya	7	4	0	11	29
3	Sumber Daya Waktu	7	3	1	11	28
Total tanggapan		42	18	10		70
Rentang Skor						56-77
Kategori						Cukup Terimplementasi

Sumber : Data olahan hasil penelitian, 2020

Dari tabel diatas, dapat diketahui tanggapan responden pada item Sumber daya kebijakan, adapun responden yang menjawab cukup terimplementasi berjumlah 2 orang ($2 \times 2 = 4$), yang menjawab kurang terimplementasi berjumlah 9 orang ($9 \times 1 = 9$), jadi skor yang diperoleh pada item informasi kebijakan adalah $4 + 9 = 13$. Untuk item penilaian kedua yaitu sumber daya biaya responden yang menjawab terimplementasi berjumlah 7 orang ($7 \times 3 = 21$), yang menjawab cukup terimplementasi berjumlah 4 orang ($4 \times 2 = 8$), jadi skor yang diperoleh pada item

sumberdaya biaya adalah $21+8=29$. Sedangkan untuk item penilaian ketiga yaitu sumberdaya waktu responden yang menjawab terimplementasi berjumlah 7 orang ($7 \times 3=21$), yang menjawab cukup terimplementasi berjumlah 3 orang ($3 \times 2=6$), sedangkan yang menjawab kurang terimplementasi berjumlah 1 orang ($1 \times 1=1$), jadi skor yang diperoleh pada item informasi kebijakan adalah $21+6+1=28$.

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari 3 (tiga) item pertanyaan yang peneliti ajukan kepada 11 orang responden maka didapat 70 total jawaban tentang sumber daya, sebanyak 42 total tanggapan responden berada pada skala terimplementasi, sebanyak 18 total tanggapan responden pada skala Cukup terimplementasi. Dan 10 dari total responden berada pada kategori Kurang terimplementasi. Jadi berdasarkan tanggapan responden indikator sumber daya berada pada kategori cukup terimplementasi. Keadaan ini menunjukkan bahwa sumber daya dalam pelaksanaan pembangunan pelabuhan belum memadai, terutama dari segi anggaran, anggaran merupakan unsur penting dalam pelaksanaan kebijakan, karena apabila tidak ada anggaran maka kegiatan tersebut tidak akan terlaksana.

Sedangkan tanggapan responden Dinas PUPR dalam pembangunan pelabuhan pengumpan lokal, maka didapat tanggapan responden atau jawaban responden terhadap indikator Sumber Daya.

Tabel V.7 Tanggapan responden Dinas PUPR dalam indikator Sumber Daya

No	Pertanyaan	Skala Pengukuran			Jumlah	Skor
		T	CT	KT		
1	Sumber Daya Manusia	1	1	3	5	8
2	Sumber Daya Biaya	0	3	2	5	8
3	Sumber Daya Waktu	0	0	5	5	5
Total tanggapan		3	8	10		21
Rentang Skor						15-25
Kategori						Kurang Terimplementasi

Sumber : Data olahan hasil penelitian, 2020

Dari tabel diatas, dapat diketahui tanggapan responden pada item sumberdaya manusia, adapun responden yang menjawab terimplementasi berjumlah 1 orang ($1 \times 3 = 3$), yang menjawab cukup terimplementasi berjumlah 1 orang ($1 \times 2 = 2$), sedangkan yang menjawab kurang terimplementasi berjumlah 3 orang ($3 \times 1 = 3$) jadi skor yang diperoleh pada item sumberdaya manusia adalah $3 + 2 + 3 = 8$. Untuk item penilaian kedua yaitu sumber daya biaya responden yang menjawab cukup terimplementasi berjumlah 3 orang ($3 \times 2 = 6$), yang menjawab kurang terimplementasi berjumlah 2 orang ($2 \times 1 = 2$), jadi skor yang diperoleh pada item sumberdaya biaya adalah $6 + 2 = 8$. Sedangkan untuk item penilaian ketiga yaitu sumberdaya waktu responden yang menjawab kurang terimplementasi berjumlah 5 orang ($5 \times 1 = 5$), jadi skor yang diperoleh pada item sumberdaya waktu adalah 5.

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari 3 (tiga) item pertanyaan yang peneliti ajukan kepada 5 orang responden maka didapat 21 total jawaban tentang sumber daya, sebanyak 3 total tanggapan responden berada pada skala terimplementasi, 8 total tanggapan responden pada skala cukup terimplementasi

dan 10 dari total tanggapan responden berada pada kategori kurang terimplementasi. Berdasarkan tanggapan responden mengenai indikator sumber daya berada pada kategori kurang terimplementasi. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi sumber daya yang digunakan belum memadai, baik itu dari segi sumber daya manusia, sumber daya biaya maupun waktu pelaksanaan pembangunan pelabuhan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir mengenai indikator Sumber daya menyatakan :

“Kendala utama kita dalam pelaksanaan pembangunan pelabuhan ini adalah tidak adanya biaya, padahal pembangunan pelabuhan sudah direncanakan dari tahun 2015 namun sampai saat ini belum ada dana yang diperuntukkan untuk pembangunan pelabuhan tersebut, mengingat transportasi laut merupakan unsur yang penting untuk menghubungkan pulau terluar dari Kabupaten Rokan Hilir ini”.

Hal ini diperkuat dengan tanggapan kepala Dinas PUPR Kabupaten Rokan Hilir yang menyatakan bahwa :

“Dalam pembangunan pelabuhan masih banyak terdapat kendala terutama masalah anggaran, minimnya anggaran pemerintah menyebabkan pelaksanaan pembangunan pelabuhan sampai saat ini belum terealisasi”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Rokan Hilir diketahui bahwa kendala utama tidak terlaksananya pembangunan pelabuhan ini adalah tidak adanya biaya yang dianggarkan oleh pemerintah pusat, sementara dalam perencanaan anggaran sejak tahun 2017 selalu dicantumkan anggaran yang akan digunakan dalam pembangunan pelabuhan, namun sampai kepada pencairan dana tahunan pembangunan pelabuhan tidak termasuk dalam pagu anggaran yang diturunkan.

Hasil wawancara sesuai dengan observasi penulis dilapangan bahwa permasalahan utama belum terlaksananya pembangunan pelabuhan disebabkan jumlah anggaran pemerintah yang terbatas, sehingga tidak ada dana yang digunakan untuk pembangunan pelabuhan di Kabupaten Rokan Hilir.

3) Disposisi

Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.

Hasil olahan data penelitian yang peneliti lakukan pada Dinas Perhubungan dalam pembangunan pelabuhan pengumpan lokal, maka didapat tanggapan responden atau jawaban responden terhadap indikator Disposisi seperti dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel V.8 Tanggapan responden Dinas Perhubungan dalam indikator Disposisi

No	Pertanyaan	Skala Pengukuran			Jumlah	Skor
		T	CT	KT		
1	Tingkat pendidikan pelaksana	7	4	0	11	29
2	Kompetensi	4	5	2	11	24
3	Integritas moralnya	10	1	0	11	32
Total tanggapan		63	20	2		85
Rentang Skor						78-99
Kategori						Terimplementasi

Sumber : Data olahan hasil penelitian, 2020

Dari tabel diatas, dapat diketahui tanggapan responden pada item tingkat pendidikan pelaksana, adapun responden yang menjawab terimplementasi berjumlah 7 orang ($7 \times 3 = 21$), yang menjawab cukup terimplementasi berjumlah 4

orang ($4 \times 2 = 8$), jadi skor yang diperoleh pada item tingkat pendidikan pelaksana adalah $21 + 8 = 29$. Untuk item penilaian kedua yaitu kompetensi responden yang menjawab terimplementasi berjumlah 4 orang ($4 \times 3 = 12$), yang menjawab cukup terimplementasi berjumlah 5 orang ($5 \times 2 = 10$), sedangkan yang menjawab kurang terimplementasi berjumlah 2 orang ($2 \times 1 = 2$) jadi skor yang diperoleh pada item kejelasan informasi adalah $12 + 10 + 2 = 24$. Sedangkan untuk item penilaian ketiga yaitu integritas moral responden yang menjawab terimplementasi berjumlah 10 orang ($10 \times 3 = 30$), yang menjawab cukup terimplementasi berjumlah 1 orang ($1 \times 2 = 2$), jadi skor yang diperoleh pada item informasi kebijakan adalah $30 + 2 = 32$.

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari 3 (tiga) item pertanyaan yang peneliti ajukan kepada 11 orang responden maka didapat 85 total jawaban tentang disposisi, sebanyak 63 total tanggapan responden berada pada skala terimplementasi, sebanyak 20 total tanggapan responden pada skala Cukup terimplementasi dan 2 dari total tanggapan responden berada pada kategori kurang terimplementasi. Berdasarkan tanggapan responden dinas Perhubungan pada indikator disposisi berada pada kategori terimplementasi. Keadaan ini menunjukkan bahwa dari segi petugas pelaksana kegiatan pembangunan pelabuhan sudah memadai baik dari segi tingkat pendidikan pelaksana, kompetensi maupun dari segi integritas moral pelaksana.

Sedangkan tanggapan responden Dinas PUPR dalam pembangunan pelabuhan pengumpan lokal, maka didapat tanggapan responden atau jawaban responden terhadap indikator Disposisi yang dituangkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel V.9 Tanggapan responden Dinas PUPR dalam indikator Disposisi

No	Pertanyaan	Skala Pengukuran			Jumlah	Skor
		T	CT	KT		
1	Tingkat pendidikan pelaksana	3	2	0	5	13
2	Kompetensi	2	3	0	5	12
3	Integritas moralnya	2	3	0	5	12
Total tanggapan		21	16	0		37
Rentang Skor						36-45
Kategori						Terimplementasi

Sumber : Data olahan hasil penelitian, 2020

Dari tabel diatas, dapat diketahui tanggapan responden pada item tingkat pendidikan pelaksana, adapun responden yang menjawab terimplementasi berjumlah 3 orang ($3 \times 3 = 9$), yang menjawab cukup terimplementasi berjumlah 2 orang ($2 \times 2 = 4$), jadi skor yang diperoleh pada item informasi kebijakan adalah $9 + 4 = 13$. Untuk item penilaian kedua yaitu kompetensi responden yang menjawab terimplementasi berjumlah 2 orang ($2 \times 3 = 6$), yang menjawab cukup terimplementasi berjumlah 3 orang ($3 \times 2 = 6$), jadi skor yang diperoleh pada item kompetensi adalah $6 + 6 = 12$. Sedangkan untuk item penilaian ketiga yaitu integritas moral yang menjawab terimplementasi berjumlah 2 orang ($2 \times 3 = 6$), yang menjawab cukup terimplementasi berjumlah 3 orang ($3 \times 2 = 6$), jadi skor yang diperoleh pada item integritas moral adalah $6 + 6 = 12$.

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari 3 (tiga) item pertanyaan yang peneliti ajukan kepada 5 orang responden maka didapat 37 total jawaban tentang disposisi, sebanyak 21 total tanggapan responden berada pada skala terimplementasi, 16 dari total tanggapan responden pada skala cukup terimplementasi. Berdasarkan tanggapan responden dinas PUPR pada indikator Disposisi berada pada kategori terimplementasi. Hal ini memperkuat tanggapan

responden sebelumnya yang menyatakan bahwa dari segi tingkat pendidikan pelaksana sudah memadai, begitu juga kompetensi dan integritas moral pegawai hal ini dapat menunjang percepatan pembangunan pelabuhan di Kabupaten Rokan Hilir.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir mengenai indikator Disposisi menyatakan :

“Pada umumnya pegawai yang bekerja di Dinas Perhubungan memiliki latar belakang pendidikan S1, sehingga dari segi tingkat pendidikan sudah memadai, begitu juga dengan kemampuan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan, pegawai Dinas Perhubungan mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tupoksi yang telah diberikan ”.

Hal ini diperkuat dengan tanggapan kepala Dinas PUPR Kabupaten Rokan Hilir yang menyatakan bahwa :

“Dari segi kemampuan pegawai saya rasa pegawai cukup handal dalam menyelesaikan pekerjaannya dan cukup professional dalam bidangnya, dari tingkat pendidikan juga sudah memadai, sebagian besar pegawai sudah berpendidikan minimal sarjana bahkan sudah banyak yang menyelesaikan magisternya, jadi dari segi kemampuan pegawai dalam pelaksanaan pembangunan pelabuhan sudah memadai”.

Hasil observasi peneliti diketahui bahwa dari segi tingkat pendidikan memang sudah cukup memadai, namun dari segi kemampuan kerja pegawai masih perlu ditingkatkan lagi, karena dilihat dari kinerja pegawai masih banyak pegawai yang tidak memahami bidangnya dan bahkan selalu meminta bantuan kepada bidang lain serta tingkat kedisiplinan pegawai yang masih rendah bahkan masih banyak pegawai yang tidak masuk kantor pada hari kerja sehingga mengenai kemampuan pegawai masih perlu pengawasan lebih lanjut oleh pimpinan pada instansi tersebut. Dan juga kurangnya ketegasan dalam mendukung suatu kebijakan yang sudah dipersiapkan, hal ini menjadi salah satu

faktor penghambatnya pembangunan pelabuhan. Kurangnya kerjasama untuk mewujudkan suatu kepentingan bersama jadi pada faktor ini dilihat dari fakta lapangan yaitu cukup terimplementasi.

4) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang melaksanakan kebijakan mempunyai pengaruh penting pada implementasi. Salah satu dari aspek-aspek struktural paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja ukuran dasarnya (Standard Operating Procedure, SOP). Prosedur-prosedur biasa ini dalam menanggulangi keadaan-keadaan umum digunakan dalam organisasi- organisasi publik dan swasta, dengan menggunakan SOP para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia. Selain itu, SOP juga menyeragamkan tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi- organisasi yang kompleks dan tersebar luas, yang pada gilirannya dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar, dan menghindari fragmentasi organisasi.

Hasil olahan data penelitian yang peneliti lakukan pada Dinas Perhubungan dalam pembangunan pelabuhan pengumpan lokal, maka didapat tanggapan responden atau jawaban responden terhadap indikator Struktur Birokrasi.

Tabel V.10 Tanggapan responden Dinas Perhubungan dalam indikator Struktur Birokrasi

No	Pertanyaan	Skala Pengukuran			Jumlah	Skor
		T	CT	KT		
1	Tugas dan Fungsi	10	1	0	11	32
2	SOP	11	0	0	11	33
3	Struktur Organisasi	11	0	0	11	33
Total tanggapan		96	2	0		98
Rentang Skor						78-99
Kategori					Terimplementasi	

Sumber : Data olahan hasil penelitian, 2020

Dari tabel diatas, dapat diketahui tanggapan responden pada tugas dan fungsi, adapun responden yang menjawab terimplementasi berjumlah 10 orang ($10 \times 3 = 30$), yang menjawab cukup terimplementasi berjumlah 1 orang ($1 \times 2 = 2$), jadi skor yang diperoleh pada item tugas dan fungsi adalah $30 + 2 = 32$. Untuk item penilaian kedua yaitu SOP responden yang menjawab terimplementasi berjumlah 11 orang ($11 \times 3 = 33$), jadi skor yang diperoleh pada item SOP adalah 33. Sedangkan untuk item penilaian ketiga yaitu struktur organisasi yang menjawab terimplementasi berjumlah 11 orang ($11 \times 3 = 33$), jadi skor yang diperoleh pada item informasi kebijakan adalah 33.

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari 3 (tiga) item pertanyaan yang peneliti ajukan kepada 11 orang responden maka didapat 98 total jawaban tentang Struktur Birokrasi, sebanyak 96 total tanggapan responden berada pada skala terimplementasi, sebanyak 2 total tanggapan responden pada skala Cukup terimplementasi. Berdasarkan tanggapan responden berada pada kategori terimplementasi. Hal ini menunjukkan bahwa mengenai indikator struktur birokrasi sudah terlaksana dengan baik, tugas dan fungsi pegawai sudah dibagi berdasarkan bidang ilmu dan pengalaman kerja serta keahliannya, begitu juga

dengan struktur organisasi. Dan juga SOP dari masing – masing bidang sudah tersedia sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan tanggapan responden Dinas PUPR dalam pembangunan pelabuhan pengumpan lokal, maka didapat tanggapan responden atau jawaban responden terhadap indikator Struktur Birokrasi.

Tabel V.11 Tanggapan responden Dinas PUPR dalam indikator Struktur Birokrasi

No	Pertanyaan	Skala Pengukuran			Jumlah	Skor
		T	CT	KT		
1	Tugas dan Fungsi	1	0	4	5	7
2	SOP	5	0	0	5	15
3	Struktur Organisasi	5	0	0	5	15
Total tanggapan		33	0	4		37
Rentang Skor						36-45
Kategori						Terimplementasi

Sumber : Data olahan hasil penelitian, 2020

Dari tabel diatas, dapat diketahui tanggapan responden pada item tugas dan fungsi, adapun responden yang menjawab terimplementasi berjumlah 1 orang ($1 \times 3 = 3$), yang menjawab kurang terimplementasi berjumlah 4 orang ($4 \times 1 = 4$), jadi skor yang diperoleh pada item tugas dan fungsi adalah $3 + 4 = 7$. Untuk item penilaian kedua yaitu SOP responden yang menjawab terimplementasi berjumlah 5 orang ($5 \times 3 = 15$), jadi skor yang diperoleh pada item tugas dan fungsi adalah 15. Sedangkan untuk item penilaian ketiga yaitu struktur organisasi responden yang menjawab terimplementasi berjumlah 5 orang ($5 \times 3 = 15$), jadi skor yang diperoleh pada item Struktur Organisasi adalah 15.

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari 3 (tiga) item pertanyaan yang peneliti ajukan kepada 5 orang responden maka didapat 37 total jawaban tentang struktur birokrasi, sebanyak 33 total tanggapan responden berada pada skala

terimplementasi, dan 4 total tanggapan responden pada skala Kurang terimplementasi. Berdasarkan tanggapan responden berada pada kategori terimplementasi. Hal ini menunjukkan bahwa pada Dinas PUPR sudah ada pembagian jabatan yang dituangkan dalam struktur organisasi serta di ikuti oleh tugas dan fungsi dari masing – masing bagian dalam organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir mengenai indikator Komunikasi menyatakan :

“Tentu sudah ada pembagian tugas dan fungsi, ini bertujuan agar pegawai mengetahui apa yang harus dikerjakan sesuai dengan bidangnya”.

Hal ini diperkuat dengan tanggapan kepala Dinas PUPR Kabupaten Rokan Hilir yang menyatakan bahwa :

“Tugas dan fungsi tentu terlebih dahulu diberikan kepada pegawai pada suatu organisasi, dan ini juga berdasarkan jabatan yang diemban, nah jabatan tersebut sudah di gambarkan dalam struktur organisasi sehingga tidak adalagi tumpang tindih pekerjaan dalam suatu organisasi.”

Hasil wawancara sesuai dengan observasi penulis dilapangan bahwa pada Dinas Perhubungan maupun Dinas PUPR sudah memiliki struktur organisasi yang jelas dilengkapi dengan tugas dan fungsinya masing – masing. Sehingga pegawai sudah mengetahui tugas yang akan dilaksanakan selama mengembang jabatan tersebut.

Namun dilihat dari faktor yang ada di lapangan, penelitian menggambarkan bahwa kurangnya rasa tanggung jawab dari sebuah organisasi. Pada dasarnya mereka tau akan tugas dan fungsinya, SOP dari sebuah organisasi dan lain sebagainya sikap dari setiap instansi tersebut merupakan salah satu faktor pendukung dalam pembangunan pelabuhan, dilihat dari keseriusan dari sebuah

instansi tersebut memperjuangkan kebijakan untuk pembangunan pelabuhan bagi kelangsungan masyarakat yang hidupnya pada laut. Jadi pada faktor lapangan peneliti menyimpulkan bahwa ini termasuk dalam indikator kurang terimplementasi.

Tabel V.12 Rekapitulasi Tanggapan responden Dinas Perhubungan

No	Variabel	Indikator	Skala Pengukuran			Skor
			T	CT	KT	
1	Implementasi	Komunikasi	72	18	0	90
2		Sumber daya	42	18	10	70
3		Disposisi	63	20	2	85
4		Struktur Birokrasi	96	2	0	98
Total tanggapan			273	58	12	343
Rentang skor						309-396
Kategori						Terimplementasi

Sumber : Data olahan hasil penelitian, 2020

Dari tabel rekapitulasi yang peneliti paparkan pada tabel diatas tentang Implementasi Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal di Kabupaten Rokan Hilir dapat diketahui bahwa dari empat indikator yang telah peneliti kemukakan dengan 12 item pertanyaan yang peneliti ajukan kepada 11 orang responden maka didapat total 343 total jawaban tentang variabel implementasi, sebanyak 273 total tanggapan responden berada pada skala terimplementasi, sebanyak 58 total tanggapan atau responden berada pada skala cukup terimplementasi dan 12 total tanggapan responden berada pada skala kategori kurang terimplementasi. Dengan rentang skor 309-396 masuk dalam kategori terimplementasi. Keadaan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan pelabuhan pengumpan local di Kabupaten Rokan Hilir sudah sesuai seperti yang direncanakan namun dalam implementasi pembangunan pelabuhan belum terealisasi sama sekali.

Tabel V.13 Rekapitulasi Tanggapan responden Dinas PUPR

No	Variabel	Indikator	Skala Pengukuran			Skor
			T	CT	KT	
1	Implementasi	Komunikasi	0	20	5	25
2		Sumber daya	3	8	10	21
3		Disposisi	21	16	0	37
4		Struktur Birokrasi	33	0	4	37
Total tanggapan			57	44	19	120
Rentang skor						101-140
Kategori						Cukup Terimplementasi

Sumber : Data olahan hasil penelitian, 2020

Dari tabel rekapitulasi yang peneliti paparkan pada tabel diatas tentang Implementasi Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal di Kabupaten Rokan Hilir dapat diketahui bahwa dari empat indikator yang telah peneliti kemukakan dengan 12 item pertanyaan yang peneliti ajukan kepada 5 orang responden Dinas PUPR Kabupaten Rokan Hilir maka didapat total 120 total jawaban tentang variabel implementasi, sebanyak 57 total tanggapan responden berada pada skala terimplementasi, sebanyak 44 total tanggapan atau responden berada pada skala cukup terimplementasi dan 19 total tanggapan responden berada pada skala kategori kurang terimplementasi. Dengan rentang skor 101-140 masuk dalam kategori cukup terimplementasi. Hal ini menunjukkan sudah ada perencanaan dan pergerakan yang dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan pelabuhan pengumpan lokal di Kabupaten Rokan Hilir namun masih ada kendala dalam pelaksanaannya yaitu anggaran yang akan digunakan untuk pembangunan pelabuhan belum tersedia, padahal anggaran tersebut sudah dibunyikan berkali – kali dalam pagu anggaran, namun belum terealisasi.

Tanggapan responden sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir yang menyatakan bahwa :

“Pelaksanaan pembangunan pelabuhan memang sudah lama di rencanakan, pelabuhan merupakan salah satu tempat persinggahan kapal – kapal dan sebagai alat penunjang transportasi laut, masyarakat Kabupaten Rokan Hilir pada umumnya memiliki ketergantungan sangat tinggi terhadap sarana dan prasarana transportasi laut dikarenakan ekonomi masyarakat di Rokan Hilir khususnya bagan siapi – api berada pada sector perikanan. Namun sampai saat ini rencana tersebut belum bisa terealisasi disebabkan minimnya anggaran, sedangkan permintaan pembangunan pelabuhan kepada pemerintah pusat sampai saat ini belum terlaksana.”

Sedangkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas PUPR, yang menyatakan :

“Sampai saat ini kami belum menerima berita apapun tentang pelaksanaan pembangunan pelabuhan, kami hanya bekerja pada bidang teknisnya saja, mengenai perencanaan pembangunannya itu merupakan tugas dari Dinas Perhubungan. Jadi disini tugas kami hanya membantu pengeloaan teknis kegiatan seperti membantu dalam pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pelabuhan sedangkan untuk pembangunan fisik itu dikerjakan oleh pihak ketiga yaitu kontraktot”.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan mengenai Implementasi Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal Dinas Perhubungan Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir diketahui bahwa sampai saat ini pembangunan pelabuhan belum terlaksana, masyarakat sampai saat ini masih menggunakan pelabuhan swasta milik masyarakat, sehingga masyarakat masih mengeluarkan biaya yang lumayan besar untuk menggunakan fasilitas pelabuhan tersebut. Sedangkan pelabuhan merupakan elemen penting sebagai sarana perhubungan laut yang menghubungkan dengan pulau – pulau lainnya dan juga sebagai saranan penunjang dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Rokan Hilir karena sebagian masyarakat Kabupaten Rokan Hilir khususnya Bagan siapi – api memiliki mata pencaharian pada sektor perikanan.

Permasalahan utama belum terlaksananya pembangunan pelabuhan disebabkan jumlah anggaran pemerintah yang terbatas, sehingga tidak ada dana yang digunakan untuk pembangunan pelabuhan di Kabupaten Rokan Hilir. Adapun kondisi pegawai yang melaksanakan pembangunan pelabuhan jika dari segi tingkat pendidikan memang sudah cukup memadai, namun dari segi kemampuan kerja pegawai masih perlu ditingkatkan lagi, karena dilihat dari kinerja pegawai masih banyak pegawai yang tidak memahami bidangnya dan bahkan selalu meminta bantuan kepada bidang lain serta tingkat kedisiplinan pegawai yang masih rendah bahkan masih banyak pegawai yang tidak masuk kantor pada hari kerja sehingga mengenai kemampuan pegawai masih perlu pengawasan lebih lanjut oleh pimpinan pada instansi tersebut. Dinas Perhubungan maupun Dinas PUPR sudah memiliki struktur organisasi yang jelas dilengkapi dengan tugas dan fungsinya masing – masing. Sehingga pegawai sudah mengetahui tugas yang akan dilaksanakan selama mengembang jabatan tersebut.

5.3. Faktor Penghambat Implementasi Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal Dinas Perhubungan Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir.

Adapun faktor penghambat dalam implementasi pembangunan pelabuhan pengumpan lokal di Kabupaten Rokan Hilir disebabkan oleh :

1. Belum tersedianya anggaran yang diperuntukkan untuk pembangunan pelabuhan pengumpan lokal di Kabupaten Rokan Hilir, padahal rencana pembangunan pelabuhan sudah dibuat dari tahun 2017 namun

sampai saat ini pagu anggaran belum diturunkan dan pembangunan pelabuhan pengumpan lokal belum bisa terealisasi.

2. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir kurang tegas serta kurang gencar dalam pelaksanaan pembangunan pelabuhan pengumpan lokal di Kabupaten Rokan Hilir, hal ini terlihat dari ketidakseriusan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan pelabuhan pengumpan lokal di Kabupaten Rokan Hilir.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal Dinas Perhubungan Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir belum terimplementasi, hal ini didasari uraian per indikator sebagai berikut :

1. Berdasarkan tanggapan responden pada indikator komunikasi berada pada kategori kurang terimplementasi. Keadaan ini menunjukkan bahwa dalam implementasi pembangunan pelabuhan pengumpan lokal pada indikator komunikasi menurut responden Dinas PUPR belum terimplementasi dengan baik, dikarenakan sebagian besar pegawai Dinas PUPR tidak mengetahui pembangunan pelabuhan tersebut serta tidak ada kebijakan yang mengatur tentang pembangunan pelabuhan di Kabupaten Rokan Hilir. Sedangkan tanggapan responden Dinas PUPR pada indikator komunikasi berada pada kategori kurang terimplementasi. Dari hasil observasi di lapangan, peneliti menyimpulkan bahwa pemerintah sebenarnya kurang gencar dalam pembahasan pembangunan pelabuhan, padahal pelabuhan merupakan salah satu tempat mata pencaharian masyarakat setempat.
2. Berdasarkan tanggapan responden indikator sumber daya berada pada kategori cukup terimplementasi. Keadaan ini menunjukkan bahwa

sumber daya dalam pelaksanaan pembangunan pelabuhan belum memadai, terutama dari segi anggaran, anggaran merupakan unsur penting dalam pelaksanaan kebijakan, karena apabila tidak ada anggaran maka kegiatan tersebut tidak akan terimplementasi. Sedangkan tanggapan responden Dinas PUPR mengenai indikator sumber daya berada pada kategori kurang terimplementasi. Pemerintah juga harusnya mengutamakan pembangunan pelabuhan terlebih dahulu sebelum mengalokasikan keuangan APBD untuk pembangunan infrastruktur yang lain. Namun pada kenyataannya yang dilihat secara kasat mata, pemerintah rokan hilir hanya gencar membuat dan mengalokasikan pembangunan-pembangunan saja.

3. Berdasarkan tanggapan responden dinas Perhubungan pada indikator disposisi berada pada kategori terimplementasi. Keadaan ini menunjukkan bahwa dari segi petugas pelaksana kegiatan pembangunan pelabuhan sudah memadai baik dari segi tingkat pendidikan pelaksana, kompetensi maupun dari segi integritas moral pelaksana. Sedangkan tanggapan responden dinas PUPR pada indikator Disposisi berada pada kategori terimplementasi. Pemerintah juga seharusnya mampu membangun pelabuhan yang sudah bertahun-tahun dianggarkan namun tidak terlaksana dengan baik, dengan berbagai argumen dan alasan yang dilontarkan oleh pemerintah, bahwa banyak kendala yang terjadi untuk wewenang, tanggung jawab, anggaran dan lain sebagainya dalam pembangunan pelabuhan.

4. Berdasarkan tanggapan responden berada pada kategori terlaksana. Hal ini menunjukkan bahwa mengenai indikator struktur birokrasi sudah terimplementasi dengan baik, tugas dan fungsi pegawai sudah dibagi berdasarkan bidang ilmu dan pengalaman kerja serta keahliannya, begitu juga dengan struktur organisasi. Sedangkan tanggapan responden berada pada kategori terimplementasi. Dan dilihat dari segi struktur birokrasinya, pemerintah dan orang-orang yang ada didalamnya itu harus melakukan apa, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Padahal sudah meliputi dari fenomena yang ada, bahwa terdapat pelabuhan yang sudah mati, pelabuhan yang tidak beroperasi lagi dan sebagainya.
5. Sehingga struktur birokrasi ini menentukan keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan yang dibutuhkan dari struktur organisasi yang tertata rapi guna mencapai tujuan pembangunan pelabuhan.
6. Rekapitulasi penelitian dari responden Dinas Perhubungan masuk dalam kategori kurang terimplementasi. Keadaan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan pelabuhan pengumpan local di Kabupaten Rokan Hulu belum terimplementasi seperti yang direncanakan. Rekapitulasi penelitian dari responden Dinas PUPR masuk dalam kategori cukup terlaksana. Hal ini menunjukkan sudah ada perencanaan dan pergerakan yang dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan pelabuhan pengumpan local di Kabupaten Rokan Hilir namun masih ada kendala dalam pelaksanaannya yaitu anggaran yang

akan digunakan untuk pembangunan pelabuhan belum tersedia, padahal anggaran tersebut sudah dibunyikan berkali – kali dalam pagu anggaran, namun belum terealisasi.

7. Dari hasil observasi dilapangan, peneliti menyimpulkan bahwa pemerintah sebenarnya kurang genjar dalam pembahasan pembangunan pelabuhan padahal pelabuhan merupakan salah satu tempat mata pencaharian masyarakat setempat.
8. Pemerintah juga seharusnya mengutamakan pembangunan pelabuhan terlebih dahulu sebelum menganggarkan keuangan APBD untuk pembangunan infrastruktur yang lain. Namun pada kenyataannya, yang dilihat secara kasat mata pemerintah Rokan Hilir hanya gencar membuat dan menganggarkan pembangunan gedung – gedung saja.
9. Pemerintah juga seharusnya mampu membangun pelabuhan yang sudah bertahun – tahun dianggarkan namun tidak terlaksana dengan baik. Dengan berbagai argument dan alasan yang dilontarkan oleh pemerintah bahwa banyak anggaran dan lain sebagainya dalam pembangunan pelabuhan.

6.2. Saran

Adapun saran yang penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diperlukan komunikasi yang baik dari pemerintah dan pihak yang terkait dalam pembangunan pelabuhan. Dilihat dari fenomena yang ada belum

optimalnya sarana dan prasarana angkutan untuk kepulau terluar. Sehingga yang terjadi sebagian pihak dalam pembangunan pelabuhan tersebut tidak mengetahui adanya rancangan pembangunan pelabuhan.

2. Dari hal diatas, pemerintah harus lebih tegas dalam pemograman pembangunan pelabuhan ini, dan agar semua pihak yang bersangkutan ikut ambil andil dalam penguksesan pembangunan pelabuhan. Dilihat dari masalah utamanya adalah sumber daya yang kurang memadai sesuai dengan yang dilihat dilapangan. Harusnya pemerintah lebih keras lagi dalam membuat kebijakan tentang pembangunan pelabuhan. Dikarenakan pelabuhan merupakan salah satu tombak mata pencaharian nelayan. Contohnya adalah memotong anggaran pembangunan ini, dan anggarannya dialihkan untuk pembangunan pelabuhan.
3. Untuk membangun sebuah pelabuhan pemerintah juga harus memiliki sikap dan rasa tanggung jawab, karena kinerja pelaksanaan kebijakan tersebut akan sangat banyak mempengaruhi dan pemerintah juga harus memperbaiki kualitas baik itu dari tingkat pendidikan, kopetensi didalam bidangnya maupun pengalaman kerja yang akan mempengaruhi keseriusan dalam membangun sebuah pelabuhan untuk sarana dan prasarana masyarakat setempat.
4. Dan dilihat dari segi struktur birokrasinya, pemerintah dan orang-orang yang ada didalamnya itu harus melakukan apa, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Padahal sudah meliputi dari fenomena yang ada, bahwa terdapat pelabuhan yang sudah mati, pelabuhan

yang tidak beroperasi lagi dan sebagainya. Sehingga struktur birokrasi ini menentukan keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan yang dibutuhkan dari struktur organisasi yang tertata rapi guna mencapai tujuan pembangunan pelabuhan.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Faried 2013. *Teori dan Konsep Administrasi dari Pemikiran Paradigmatik Menuju Redefinisi*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andry, Hendry, 2015. *Perilaku dan Etika Administrasi Publik*. Marpoyan Tujuh. Pekanbaru
- Anggara, Sahya, 2012. *Ilmu Administrasi Negara*. Pustaka Setia.
- Hamim, Sufian, Indra Muchlis Adnan, 2005. *Administrasi dan Manajemen Pembangunan*, Multi Grafindo. Pekanbaru
- Hopkins, David. 2012. *Penelitian Tindakan kelas*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Jogiyanto, HM. 2001. *Analisis Perencanaan Sistem Informasi*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Makmur, H. 2008. *Filsafat Administrasi*. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Robbins, Stephen. P, 1994. *Teori Organisasi Struktur, Desain dan Aplikasi*. Arcan.
- Siagian, Sondang P, 2008. *Filsafat Administrasi*, Alfabeta. Bandung.
- Siagian, Sondang. 2014. *Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi, dan Strateginya*, PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Siswanto, 2013. *Pengantar Manajemen*. PT Bumi Aksara, Jakarta
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Suminta, 2005, *Administrasi Pembangunan*. Universitas Sebelas Maret, Press
- Sutabri, Tata. 2005. *Analisis Sistem Informasi*. Andi . Yogyakarta.
- Syafri, Wirman, 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Erlangga. Jakarta.
- Tim Penyusun. 2013. *Buku Pedoman Penulisan*. Badan Penerbit FISIPOL. Pekanbaru;UIR
- Zukifli, 2005, *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru, UIR,Press
- Zukifli. 2009, *Fungsi-Fungsi Manajemen*,Pekanbaru,UIR Press.
- Zulkifli, Nurmasari, 2015. *Pengantar Manajemen*. Marpoyan Tujuh. Pekanbaru.

Dokumen :

Undang – undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhan.

Peraturan Daerah Kabupaten Rijn Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan
Kabupaten Rokan Hilir.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau